LKjIP 2019

Kabupaten Ponorogo

Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
Bagian Organisasi
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedonam pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo yaitu "***PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS***".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua, Aamiin.

Ponorogo, 17 Maret 2020

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Insansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya sebagai wujud mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi guna memberikan pelayanan publik. Proses penilaian terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaannya sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019 perlu dievaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Untuk mewujudkan visi **“PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS“,** dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi, dilakukan berdasarkan 3 (tiga) strategi umum, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diperkuat dengan keteladanan pemimpin, dikelola secara transparan, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan diatas prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan yang baik akan memunculkan kepercayaan dari rakyat sehingga mampu membangun kemitraan yang luas dan dapat menopang pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan handal menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan dan memantapkan pertanian yang diharapkan mampu sebagai penyumbang utama pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya saing dan

tangguh serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang mayoritas adalah petani. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pengembangan pertanian organik secara bertahap terhadap produk-produk pertanian yang menjadi unggulan Kabupaten Ponorogo, sehingga diharapkan memberikan nilai tambah dan peningkatan daya saing bagi petani Kabupaten Ponorogo terhadap petani pada wilayah kabupaten sekitar.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan, untuk merepresentasikan pembangunan di Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021). Hasil pengukuran keberhasilan/kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan yang diukur dengan alat Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tujuan.1 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah, tercapai 99,29%, dengan parameter penilaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 3 (tiga) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator, menghasilkan capaian 1 (satu) indikator diatas target, 2 (dua) indikator sesuai target dan 2 (dua) indikator dibawah target.
2. Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah, tercapai 150,06% dengan parameter penilaian **SANGAT BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator, menghasilkan capaian 4 (empat) indikator diatas target dan 4 (empat) indikator lain dibawah target.
3. Tujuan 3 : Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab, tercapai 97,83% dengan parameter penilaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 1 (indikator) indikator dengan hasil capaian dibawah target.
4. Tujuan 4 : Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing, tercapai 88,13% dengan parameter penilaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan capaian 1 (satu) indikator diatas target dan 2 (dua) indikator dibawah target.
5. Tujuan 5 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 101,16% dengan parameter penilaian **SANGAT BAIK**.Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan masing-masing 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.
6. Tujuan 6 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 49,61% dengan parameter penilaian **KURANG**. Hal ini

dapat dilihat dari hasil pengukuran 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 4 (empat) indikator, menghasilkan 3 (tiga) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.

7. Tujuan 7 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 94,99% dengan parameter penilaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan 3 (tiga) indikator dibawah target.
8. Tujuan 8 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 108,55% dengan parameter penilaian **SANGAT BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator, menghasilkan 3 (tiga) indikator diatas target dan 2 (dua) indikator dibawah target.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

Daftar Lampiran viii

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Penyusunan 1

C. Dasar Hukum 2

D. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Ponorogo 3

E. Perangkat Daerah 10

F. Isu-isu Strategis 13

G. Sistimatika Penulisan 14

BAB II : Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 16

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 23

C. Perjanjian Kinerja 26

BAB III : Perencanaan Kinerja

A. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019 27

B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 30

C. Akuntabilitas Keuangan 68

BAB IV : Penutup

A. Kesimpulan 85

B. Saran 85

Lampiran-lampiran 87

DAFTAR TABEL

Tabel.....Halaman

1.1 Data Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 2
1.2 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Ponorogo Tahun 2014-2018 9
1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 12
2.1 Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan 18
2.2 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran 19
2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 23
2.4 RKT Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 24
3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja 28
3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019 28
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 30
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 35
3.5 Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2016-2019 37
3.6 Pertumbuhan IKM Tahun 2015-2019 40
3.7 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019 43
3.8 Data Ivestasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 44
3.9 Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2019 46
3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3 46
3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 48
3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5 54
3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 57
3.14 Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten PonorogoTahun 2015-2019 59
3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7 62
3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8 65
3.17 Alokasi Anggaran Belanja Persasaran Strategis Tahun 2019 71
3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 72
3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019 75
3.20 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 78
3.21 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo 78
3.22 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 79
3.23 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemkab Ponorogo 79
3.24 Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Moda Pemkab Ponorogo 81
3.25 Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan RPB Pemkab Ponorogo 82
3.26 Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemkab Ponorogo 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar ..... Halaman

1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2019 7
1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Ponorogo dan Jatim Tahun 2014-2018 (%) 8
1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018 10
1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2019 13
3.1 Rasio Kemandirian 78
3.2 Rasio Efektivitas 80
3.3 Rasio Aktivitas 81
3.4 Rasio Pengelolaan Belanja 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....Halaman

I Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ponorogo 88
II Matriks Purubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 90
III Pengukuran Kinerja Tahun 2019 96
IV Reviu Perjanjian Kinerja Bupati Ponorogo Tahun 2019 98
V Penghargaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 106

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era otonomi daerah penerapan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) akan memberi kontribusi yang strategis kepada daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu pemahaman prinsip terpenting dalam penerapan *Good Governance,* karena akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Sebagai bahan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

2. Penyampaian informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan terpercaya sehingga dapat berperan secara aktif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XII/MPR/II/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

D. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

1. Geografis

Letak geografis Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°7'-111°52' Bujur Timur dan 7º49'-8º20' Lintang Selatan, luas wilayah 1.371,78 km^2 yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan, 307 Desa/Kelurahan, 1.002 Lingkungan/Dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT).

Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
- Selatan : Kabupaten Pacitan
- Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri

Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Dusun	RW	RT
1	Siman	37,95	18	45	95	289
2	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
3	Babadan	43,93	15	56	123	480
4	Jenangan	59,44	17	60	120	402
5	Bungkal	54,01	19	63	129	340
6	Sambit	59,83	16	46	93	302
7	Sawoo	124,71	14	54	160	490
8	Mlarak	37,20	15	49	104	267
9	Jetis	22,41	14	41	81	216
10	Sooko	55,33	6	27	106	257
11	Pudak	48,92	6	19	31	79
12	Pulung	127,55	18	67	165	465
13	Ngebel	59,50	8	31	67	165
14	Kauman	36,61	16	54	113	303
15	Jambon	57,48	13	44	76	278
16	Badegan	52,35	10	34	45	229
17	Sampung	80,61	12	44	88	320
18	Sukorejo	59,58	18	58	139	388
19	Ngrayun	148,76	11	40	145	439
20	Slahung	90,34	22	61	154	413
21	Balong	56,96	20	65	121	342
Jumlah		**1.371.780**	**307**	**1.002**	**2.274**	**6.869**

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan

yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 Km². Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Slahung dengan total 22 Desa. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Balong dengan total 65 Dusun. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pudak masing-masing memiliki 6 Desa. Untuk kecamatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah Kecamatan Pudak dengan 19 Dusun.

2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, 14,4% berada diantara 500 s.d. 700 meter, dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 meter. Secara klimatologis Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan dengan suhu berkisar 18° s.d. 31°c. Kecamatan Ngrayun mempunyai wilayah terluas (184,76 km^2) dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Ponorogo, sementara wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo (22,31 km^2).

3. Geologi

Kabupaten Ponorogo bagian utara ditempati gunung lawu termasuk dalam jalur gunung api kwarter yang masih aktif, sedangkan bagian selatan termasuk dalam jalur pegunungan selatan. Perbukitan diutara sungai Tirtomoyo merupakan perbukitan lipatan berarah timur laut-datar barat daya. Beberapa tonjolan morfologi dibentuk oleh batuan terobosan, secara morfogenesis perbukitan ini dipengaruhi oleh struktur dan sifat litologi. Batuan oligosen akhir-miosen awal di lembar ponorogo dibagi menjadi fasies turbidit (formasidayakan) dan fasies gunungapi (formasi watupatok dan panggang). Ketiga satuan yang saling menjemari ini ditindih selaras oleh formasi semilir kumpulan sedimen turbidit asal gunung api yang berumur Miosen Awal. Batuan gunung api andesit basal formasi nglanggran berumur akhir miosen awal menindih selaras satuan dibawahnya. Kumpulan batuan oligo-miosen itu ditutupi oleh satuan batu gamping tua (formasi sampung) yang pembentukannya masih dipengaruhi oleh gejala longsoran bawah laut. Runtunan klastika gampingan dibagian atas satuan ini dinamakan anggota Cendono. Formasi sampung yang berumur akhir miosenawal ini diterobos oleh andesit, das dan basal. Runtunan tersebut ditindih tak selaras oleh batu gamping muda berumur miosen tengah-pliosen yaitu formasi wonosari yang dikuasai oleh batu gamping terumbu. Batuan gunungapi kuarter kompleks lawu yang bersusunan andesit menindih tak selaras satuan

yang lebih tua. Kumpulan batuannya dibedakan menjadi kelompok Jabolarangan atau lawu tua yang berumur holosen. Gunung Lawu masih giat sampai dengan sekarang. Kepingan fosil vertebrata dan peralatan batu manusia purba (artefak) yang diduga berumur plistosen akhir sertapra-sejarah terdapat di Goa Sampung di lereng tenggara gunung lawu.

4. Hidrologi

Kabupaten Ponorogo memiliki sungai 17 sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi. Karena mata pencaharian utama masyarakat adalah petani maka irigasi manjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktifitas petani. Adapun sungai yang paling panjang adalah Sungai Sungkur yang panjangnya mencapai 58,10 km, sedangkan yang paling pendek adalah sungai Bedingin yang panjangnya hanya 4 km. Sedangkan diantara sungai yang ada di Kabupaten Ponorogo, Sungai Asin mampu mengairi sawah paling tinggi mencapai 5.656 hektar, sedangkan yang paling rendah adalah Sungai Gonggang yang hanya mampu mengairi sawah sebanyak 25 hektar.

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo meliputi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian terklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Total lahan pertanian mencapai 73.192 Ha, yang terbagi dari lahan sawah mencapai 34.801Ha dan lahan bukan sawah yang mencapai 38.391Ha. Sedangkan cakupan lahan bukan pertanian mencapai 63.986 Ha.

6. Kawasan Pengembangan Agropolitan

Penentuan wilayah sebagai kawasan agropolitan didasari dengan berbagai pertimbangan diantaranya memiliki ketersediaan sarana prasarana yang memadai, produktivitas tinggi dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan bernilai ekonomi tinggi. Adapun kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

a) Kecamatan Pudak

Sebagai wilayah yang berada di pegunungan, Kecamatan Pudak cocok untuk budidaya tanaman holtikultura (buah dan sayur). Kondisi tersebut ditunjang dengan ketersediaan air yang melimpah dan kontur tanah yang berbukitbukit. Selain itu wilayah ini cocok untuk perkebunan seperti cengkeh, kapuk randu, kopi dan melinjo.

b) Kecamatan Ngebel

Wilayah Kecamatan Ngebel berada pada lereng gunung dan terdapat telaga. Untuk itu wilayah ini cocok untuk dijadikan potensi pengembangan

perikanan kerambah air tawar. Pengelolaan perikanan air tawar dapat dilakukan dengan sistim kerambah. Selain itu untuk perkebunan seperti cengkeh, kopi dan melinjo dapat dikembangkan. Saat ini produk andalan yang mulai berkembang dan memiliki potensi tinggi adalah buah durian dan manggis.

c) Kecamatan Babadan

Kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Ponorogo ini cocok untuk dikembangkan tanaman padi. Adapun desa yang dapat ditanami padi meliputi: Desa Kertosari, Cekok, Patihan Wetan, Kadipaten, Japan, Gupolo, Polorejo, Bareng, Ngunut, Sukosari, Lembah, Pondok, Babadan, Purwosari dan Trisno.

d) Kecamatan Sooko

Wilayah Kecamatan Sooko memiliki luas wilayah 5.532,10 Ha dan berada pada ketinggian ±450 m s.d. 600 m diatas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk perkebunan cengkeh. Selain untuk perkebunan, wilayah Kecamatan Sooko cangat cocok untuk ditanami padi organik. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan curah hujan yang mencapai 20 kali dalam satu bulan, sehingga ketersediaan air sangat berlimpah. Ketersediaan air yang berlimpah juga digunakan dalam pembudidayaan perikanan air tawar. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Kampung Ikan di Desa Jurug Kecamatan Sooko.

7. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan seluas 65.736 Ha dengan rincian pertanian sawah seluas 34.572 Ha, tegalan seluas 30.804 Ha dan untuk kawasan ini keberadaanya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka sawah di Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem irigasi (95,40% dari seluruh luasan sawah yang ada) sedangkan sebagian lagi merupakan sawah tadah hujan seluas 4,6% dari total luasan sawah yang ada. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Ponorogo. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman

pangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten Ponorogo berencana mengalokasikan lahan seluas 25.000 Ha sebagai lahan pertanian abadi.

8. Demografi

Jumlah Penduduk di Ponorogo tahun 2019 sebesar 971.617 jiwa dengan komposisi Laki-Laki 485.430 jiwa (49,96%) dan Perempuan 486.187 (50,04%). Jumlah Penduduk Ponorogo menurut jenis kelamin dan kecamatan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2019

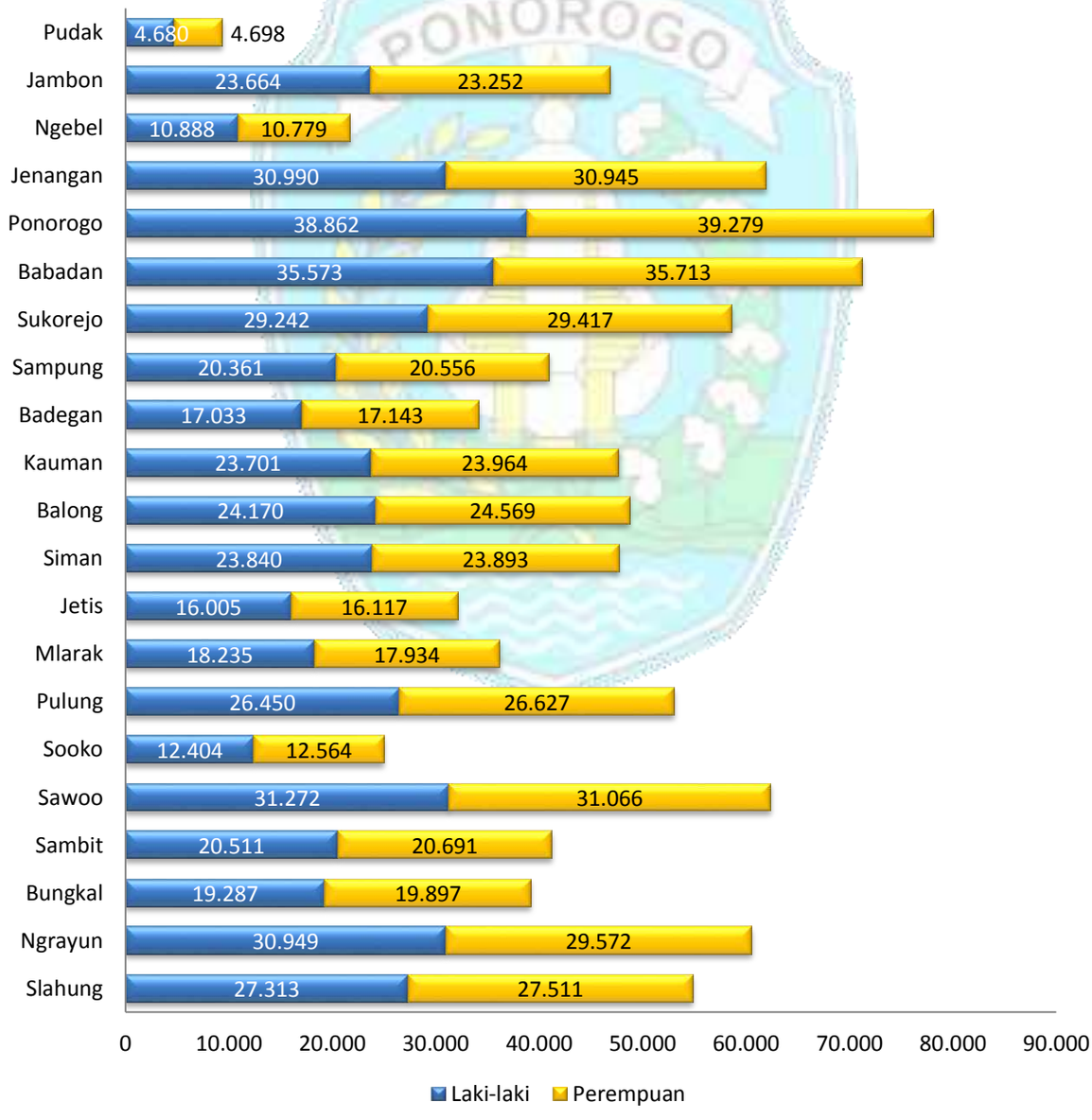

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo, 2019

9. Kondisi Perekonomian Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 menurut penghitungan tahun dasar 2010 mencapai 5,31%, meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya mampu mencapai 5,1%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang masih mampu tumbuh hingga 5,5% pada tahun 2018. Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 5,46%.

Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Ponorogo dan Jatim Tahun 2014-2018 (%)

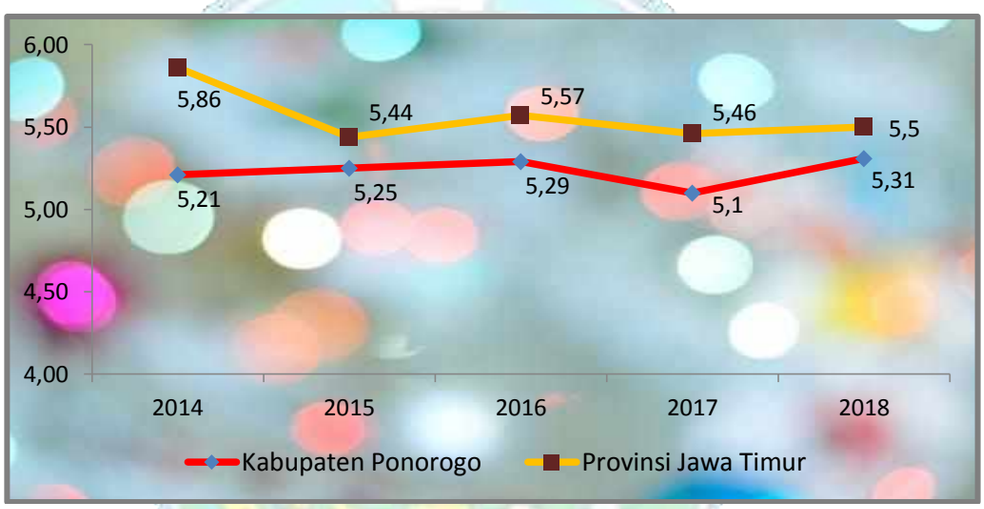

Sumber: Analisis Perekonomian Daerah Kab. Ponorogo Tahun 2019

Walaupun berbasis pertanian, namun dari tahun ke tahunkondisinya cenderung menurun. Faktor tingkat kesuburan lahan yang semakin menurun serta perubahan iklim yang kurang mendukung kegiatan pertanian menyebabkan kontribusi pertanian semakin menurun, bahkan pada 2018 kinerjanya mengalami kontraksi akibat menurunnya produksi kedelai dan ubi kayu. Sehingga dengan ini sektor perekonomian Kabupaten Ponorogo bergeser ke perdagangan dan insdustri pengolahan.

Selama kurun waktu 2014 s.d. 2018 kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total perekonomian Kabupaten Ponorogo menurun dari 31,6% menjadi 28,04%. Sementara kontribusi perdagangan terus meningkat, dari 15,19% pada tahun 2014 menjadi 17,84% ditahun 2018.

Tabel 1.2

Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Ponorogo Tahun 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,6	31,65	30,84	29,03	28,04
B	Pertambangan dan Penggalian	2,39	2,3	2,22	2,24	2,26
C	Industri Pengolahan	6,79	6,74	6,73	7	7,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,45	9,2	9,47	9,8	9,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,91	16,18	16,63	17,3	17,84
H	Transportasi dan Pergudangan	1,54	1,58	1,62	1,73	1,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,8	2,89	3,01	3,16	3,22
J	Informasi dan Komunikasi	6,87	6,83	6,86	6,95	6,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,2	3,24	3,26	3,26
L	*Real Estate*	2,34	2,44	2,42	2,44	2,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	5,23	5,29	5,25	5,36
P	Jasa Pendidikan	8,46	8,45	8,4	8,52	8,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8	0,76	0,75	0,77	0,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,94	1,97	1,92	1,94	1,96
Total		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan mudah diakses oleh masyarakat mampu mempengaruhi pola konsumen. Hal ini mendorong meningkatnya kinerja sektor perdagangan, bahkan usaha perdagangan dengan sistem online (*online shop*) saat ini telah lazim dilakukan melalui berbagai platform yang tersedia. Dalam kegiatan konomi, perkembangan yang terjadi disuatu sektor ekonomi akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan sektor lainnya.

Perkemabangan jumlah penduduk juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, seperti perdagangan, konstruksi, listrik, air, jasa,

pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan juga akan bertambah.

10. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mengalami peningkatan meskipun masih berada pada kategori sedang dengan nilai 69,91. Namun demikian IPM Kabupaten Ponorogo masih berada di bawah IPM Jawa Timur yang mencapai 70,77. Pertumbuhan pencapaian IPM Kabupaten Ponorogo selama 2017-2018 sebesar 0,94%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya (0,48%). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menempati peringkat 22 dalam hal pencapaian IPM.

Gambar 1.3
Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018

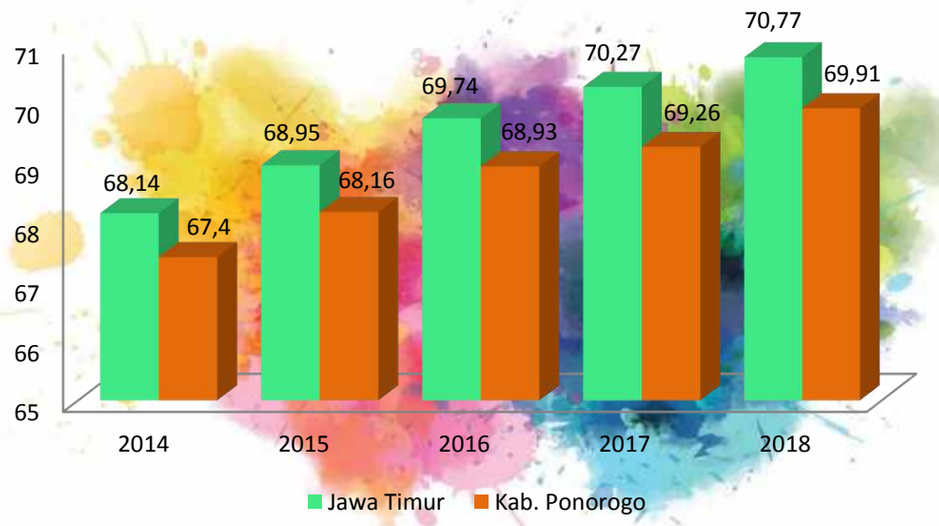

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Meski IPM meningkat namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo masih cukup banyak karena usaha pengentasan kemiskinan tidaklah sederhana, meliputi perbaikan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang kompleks. Persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mencapai angka 10,36 persen atau sekitar 90,22 ribu jiwa, menurun dibanding tahun sebelumnya (99,03 ribu jiwa).

E. PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

susunan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

"**Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah".**

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan pada Peraturan Daerah tersebut adalah :

a. **Sekretariat Daerah,** terdiri dari :
   1. Sekretaris Daerah
   2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum.
   3. Asisten Erekonomian dan Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
   4. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 4 (empat) Bagian yaitu : Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.
b. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
c. **Inspektorat**
d. **RSUD Dr. Harjono S.**
e. **Dinas,** terdiri dari :
   1. Dinas Pendidikan;
   2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
   3. Dinas Kesehatan
   4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   8. Satuan Polisi Pamong Praja
   9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
   11. Dinas Tenaga Kerja
   12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
   13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
   14. Dinas Perhubungan
   15. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

16. Dinas Lingkungan Hidup
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

f. Badan, terdiri dari :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

g. Kecamatan, yaitu Kecamatan Ponorogo, Jenangan, Babadan, Siman, Kauman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Jambon, Balong, Slahung, Bungkal, Ngrayun, Sambit, Sawoo, Mlarak, Jetis, Pulung, Ngebel, Sooko, dan Pudak.

h. Kelurahan, yaitu : Kelurahan Paju, Brotonegaran, Pakunden, Kepatihan, Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, Bangunsari, Tamanarum, Kauman, Tambakbayan, Pinggirsari, Mangkujayan, Banyudono, Nologaten, Cokromenggalan, Keniten, Jingglong, Beduri, Setono, Singosaren, Kertosari, Kepatihan Wetan, Kadipaten, Ronowijayan, dan Mangunsuman.

i. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Ponorogo tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2019 sejumlah 9.549 orang dengan komposisi PNS laki-laki (53%) lebih banyak dari PNS perempuan (47 persen). Jumlah PNS terus menurun dari tahun ke tahun akibat kebijakan moratorium PNS yang masih diberlakukan, sementara tidak ada penggantian bagi PNS yang memasuki masa pensiun.

Tabel 1.3

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Lulusan SD	47
2	Lulusan SLTP	151
3	Lulusan SLTA	1.616
4	Lulusan Diploma 1 (DI)	29
5	Lulusan Diploma 2 (DII)	415
6	Lulusan Diploma 3 (DIII)	935
7	Lulusan Diploma 4 (DIV)	129
8	Lulusan Strata 1 (S1)	5.530
9	Lulusan Strata 2 (S2)	479
10	Lulusan Strata 3 (S3)	1
Jumlah		**9.332**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Ponorogo, 31 Desember 2019

Menurut tingkat pendidikannya, sebagian besar PNS adalah lulusan perguruan tinggi dengan persentase sebesar 79%. Sejalan dengan tingkat pendidikannya maka komposisi golongan kepangkatan juga didominasi oleh PNS golongan IV sebesar 37% dan golongan III sebesar 40%.

Gambar 1.4

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2019

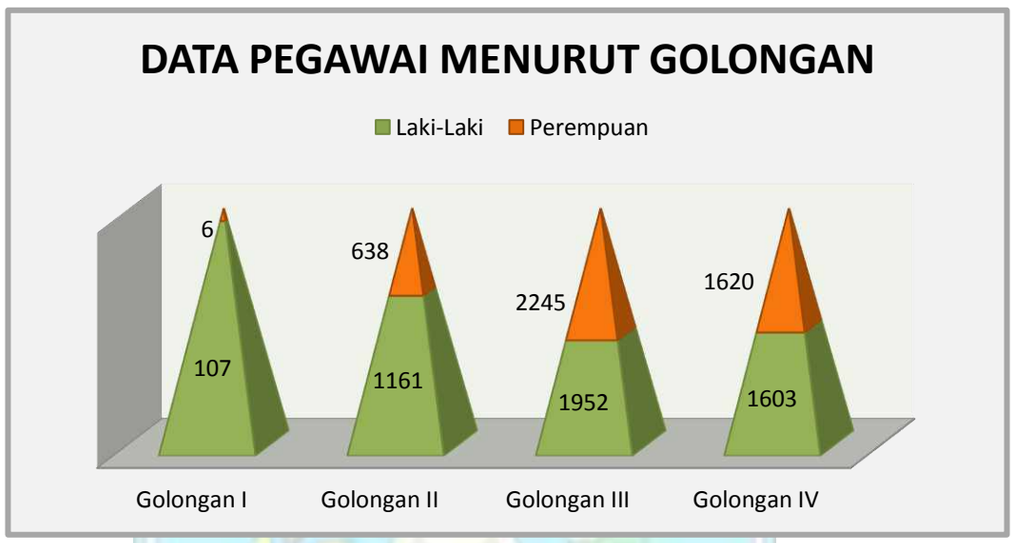

Sumber: BKPSDM Kabupaten Ponorogo, 2019

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo pada pereode 2016-2021 dirumuskan dari permasalah pembangunan dari berbagai urusan dalam pemerintahan pereode sebelumnya dan isu isu strategis internasional, nasional maupun kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, isu-isu strategis Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Isu strategis yang berkaitan dengan upaya penciptaan pembangunan berkelanjutan, dengan pertimbangan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi, sosial budaya, pertanian dan infrastruktur pendukung.
   a. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pertanian.
   b. Peningkatan produktifitas pertanian yang kompetitif dan berdaya saing dengan mengembangkan industri pertanian berbasis organik, serta industri kecil kreatif yang berdaya saing.
   c. Peningkatan akses dan sarana transportasi penduduk dan barang antar wilayah di Kabupaten Ponorogo.
   d. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan.

e. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum , layanan sanitasi dan penataan kawasan kumuh.
f. Peningkatan penataan kawasan berwawasan lingkungan.

2. Isu strategis yang dikaitkan dengan upaya peningkatan perekonomian wilayah dengan basis ekonomi lokal.
   a. Penurunan angka pengangguran dengan memperbaiki iklim usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah sesuai potensi wilayah
   b. Peningkatan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis wilayah.
3. Isu strategis yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata.
   a. Penurunan angka kemiskinan dengan mengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan pembentukan/ pengembangan BUMDes.
   b. Disparitas gender yang masih terlihat jelas.
   c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan.
4. Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan.
   a. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat
   b. Aksesbilitas pelayanan publik yang belum optimal (pemekaran wilayah).

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Uraian tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penyusunan, dasar hukum, gambaran umum daerah, organisasi perangkat daerah, isu-isu strategis dan sistimatika penulisan.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja

masing-masing sasaran, evaluasi dan analisis capaian target kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ini berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021 adalah :

" PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS "

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Lebih Maju **:** Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Ponorogo yang lebih maju, lebih unggul dan lebih memiliki daya saing dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dimana masyarakat memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin, terpenuhi kebutuhan pokok dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kondisi lebih maju yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat Ponorogo modern yang lebih sejahtera.

Berbudaya **:** Suatu tatanan kehidupan yang dicirikan dengan semakin menguatnya budaya lokal sehingga berdampak terhadap mantapnya kepribadian dan daya saing daerah dalam rangka menghadapi persaingan global. Penguatan budaya lokal akan

mendorong penguatan karakter dan jatidiri bangsa secara keseluruhan.

Religius **:** Suatu kondisi kehidupan yang dicirikan dengan meningkatnya akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks spiritual.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Ponorogo dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021, maka dirumuskan tujuh misi sebagai berikut :

***Misi* 1** **:** Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.

Misi *2* ***:*** Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.

Misi 3 ***:*** Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4 ***:*** Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh.

Misi 5 ***:*** Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Misi 6 ***:*** Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan.

Misi 7 ***:*** Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan

pemuda dan olahraga yang yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis.

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
1	Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini
3	Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap	Indeks Infrastruktur
4	Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing	PDRB Sektor Pertanian
5	Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
6	Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan	Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja, serta penegakan Perda	Angka kemiskinan
7	Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian	1. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan keluarga berencana (KB)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP
				Nilai LPPD
				Opini BPK
			Meningkatnya kapasitas Aparatur pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis potensi daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
				Persentase Koperasi sehat

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
		Indeks Gini (Ketimpangan Wilayah)	Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan.	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
				Persentase PDRB Sektor Perdagangan
				Persentase PDRB Sektor Industri
			Optimalisasi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisata
			Meningkatkan iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap	Indeks Infrastruktur.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik
4	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing	PDRB sektor pertanian	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani
				Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Angka kecukupan pangan utama
5	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat	Indeks kualitas Lingkungan hidup	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	Persentase permukiman sehat
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup
6	Mengentaskan Penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja, sertapenega kan hukum	Angka kemiskinan	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Angka pengangguran terbuka
			Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	Persentase penurunan PMKS
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun
		Pelaksanaan Norma Hukum Daerah (Perda)	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
7	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	IPM	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	Rata-rata lama sekolah
				Angka harapan lama sekolah
			Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup
8	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB	Indeks Pembangunan Gender	Menigkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan Pengendalian Penduduk	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti
				Persentase laju pertumbuhan penduduk
			Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi
				Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi

4. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 tersebut dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diperkuat dengan keteladanan pemimpin, dikelola secara transparan, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan diatas prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan yang baik akan memunculkan kepercayaan dari rakyat sehingga mampu membangun kemitraan yang luas dan dapat menopang pembangunan. Kondisi ini akan menjadi modal dasar bagi terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat serta akselerasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan secara keseluruhan.

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan handal menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan akan memperlancar arus barang dan jasa yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Penyediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat. Pengembangan pemukiman dan lingkungan sehat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c. Meningkatkan dan memantapkan pertanian yang diharapkan mampu sebagai penyumbang utama pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya saing dan tangguh serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang mayoritas adalah petani. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengembangan pertanian organik secara bertahap terhadap produk-produk pertanian yang menjadi unggulan Kabupaten Ponorogo, sehingga diharapkan memberikan nilai tambah dan peningkatan daya saing bagi petani Kabupaten Ponorogo terhadap petani pada wilayah Kabupaten sekitar.

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Kabupaten Ponorogo untuk mencapai misi pembangunan tahun 2016-2021 dilakukan melalui hal sebagai berikut, yaitu :

a. Prioritas 2017

Pembenahan Infrastruktur dan Modernisasi Pertanian melalui pengembangan produk pertanian organik

b. Prioritas 2018

Peningkatan Infrastruktur dan pengembangan agribisnis organik yang didukung oleh SDM berkualitas

c. Prioritas 2019

Pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, religi, dan agro industry yang didukung oleh infrastruktur yang kuat

d. Prioritas 2020

Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan

e. Prioritas 2021

Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya.

6. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1	Terwujudnya pelayanan prima	13
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	37
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	4
4	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	2
5	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	8
6	Optimalisasi sektor pariwisata	4
7	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	1
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	11
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	8
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	2
11	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	5
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	7
13	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	4
14	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	4
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	5
16	Menurunnya pelanggaran Perda.	7
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	6
18	Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	14
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusu-tamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	4
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	3

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

RKT Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
			Nilai LPPD	ST
			Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	86,6
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	0,7759
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	1,85%
			Persentase Koperasi sehat.	20%
		Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27%
			Persentase PDRB seckor perdagangan	16,95%
			Persentase PDRB sektor industri	7,05%
		Optimalisasi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	482.464
		Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN	2%
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	Persentase Infrastruktur publik dalam kondisi baik	70%
4	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan,	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan	Nilai tukar petani.	106,84
			Persentase Pertumbuhan nilai	2,5%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
	peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing	petani	PDRB kategori pertanian dan perikanan.	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Angka kecukupan pangan utama.	163.070,5
5	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	Persentase Permukiman sehat.	76,78%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,91
6	Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja, serta penegakan Perda	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Angka pengangguran terbuka	7,40%
		Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan PMKS	2%
		Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	55%
7	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	Rata-rata lama Sekolah	8,25
			Angka harapan lama sekolah	13,90
		Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	72,89
8	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk	IDG	63,51
			Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100%
			Persentase Laju pertumbuhan penduduk	0,18%
		Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi.	18,2%
			Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,2%

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran ditahun 2019 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan *output* ataupun *outcome* dari kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ,yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Bupati Ponorogo, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019**.**

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya managemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standart pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	KODE
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik	
2	Lebih dari 75% s.d. 100%	Baik	
3	55% s.d. 75%	Cukup	
4	Kurang dari 55%	Kurang	

Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	*Terwujudnya pelayanan prima*			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,39	101,74%
2.	*Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja*			
	Nilai SAKIP	BB	BB	101,39%
	Nilai LPPD	ST	ST*	100%
	Opini BPK	WTP	WTP	100%
3.	*Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan*			
	Indeks profesionalitas ASN	86,6	80,8	93,30%
4.	*Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro*			
	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	1,85%	1,7%	91,89%
	Persentase Koperasi sehat	20%	29%	145%
5.	*Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan*			
	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27%	0,27%	100%
	Persentase PDRB sektor perdagangan	16,95%	16,92%*	99,82%
	Persentase PDRB sektor industri	7,05%	7,15%*	101,42%
6.	*Optimalisasi sektor pariwisata*			
	Jumlah kunjungan wisata	482.464	1.123.063	232,78%
7.	*Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah*			
	Persentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN	2%	99,04%	4952%
8.	*Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar*			
	Persentase Infrastruktur publik dalam kondisi baik	70%	68,48%	97,83%
9.	*Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani*			
	Nilai tukar petani	106,84	115,39*	108%

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Persentase Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,5%	1,58%**	63,20%
10.	*Meningkatnya ketahanan pangan daerah*			
	Angka kecukupan pangan utama	163.070,5	151.976,5	93,20%
11.	*Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat*			
	Persentase Permukiman sehat	76,78%	76,75%	99,96%
12.	*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*			
	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,91	70,54	102,37%
13.	*Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha*			
	Angka pengangguran terbuka	7,40%	3,33%	155%
14.	*Menurunnya masalah kesejahteraan social*			
	Persentase Penurunan PMKS	2%	7,64%	(182%)
15.	*Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa*			
	Indeks Desa Membangun	0,7759	0,972*	125,27%
16.	*Menurunnya pelanggaran Perda*			
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	55%	55,10%	100,18%
17.	*Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga*			
	Rata-rata lama Sekolah	8,25	7,17*	86,91%
	Angka harapan lama sekolah	13,90	13,71*	98,63%
18.	*Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat*			
	Usia harapan hidup	72,89	72,47*	99,42%
19.	*Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk*			
	IDG	63,51	64,14	100,99%
	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100%	91,43%	91,43%
	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	0,18%	0,12%*	133,33%
20.	*Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga*			
	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi	18,2%	20%	109,89%
	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,2%	15%	82,42%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun 2019 dari 3 (tiga puluh) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 46,67% dalam kategori **SANGAT BAIK**, 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 46,67% dalam kategori **BAIK,** 1 (cukup)

indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dalam kategori **CUKUP,** dan **1** (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dalam kategori **KURANG**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**, Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah, dengan **Tujuan pertama Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	74,17	81,39	101,74%	81,00	100,48%
2.	Nilai SAKIP	BB	B	BB	101,39%	A	88,71%
3.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	100%
4.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
5.	Indeks Profesionalitas ASN	86,6	78	80,8	93,3%	87,2	92,66%

Tujuan **mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Terwujudnya pelayanan prima,** dicapai dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

   Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di layanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan, dimana nilai IKM tahun 2015 sebesar 77,51, nilai IKM tahun 2016 sebesar 74,63 dan nilai IKM tahun 2017 sebesar 74,78 dan nilai IKM tahun 2018 sebesar 74,17. Pada

tahun 2019 Unit Pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat sejumlah 60 (enam puluh) Unit Pelayanan dengan nilai IKM tahun 2019 sebesar 81,39 dengan capaian sebesar 101,74% masuk dalam kategori **SANGAT BAIK.** Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran pimpinan sampai dengan level staf dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan aparatur pemerintah.
- Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.
- Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. **Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas**, dicapai dengan indikator :

a. Nilai SAKIP

Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 mendapatkan nilai 70,97 dengan predikat BB dengan capaian 101,39% masuk kategori **SANGAT BAIK**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang didapatkan pada tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 63,79. Penilaian ini menunjukkan komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan pada tingkat pimpinan diberbagai tingkatan organisasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh Pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

Langkah strategis yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

- Menerapkan manajemen kinerja, memperbaiki dokumen perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.
- Mengkaitkan tunjangan prestasi kerja berdasarkan kepada kinerja yang dicapai (TPP/Tukin).
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas APIP.

- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal AKIP.
- Pengintegrasian antara perencanaan dan penganggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian kinerja, baik di tingkat Kabupaten maupun di OPD.
- Melaksanakan pembinaan melalui pendampingan kepada OPD.

b. Nilai LPPD

Status Kinerja LPPD Kabupaten, nilai tahun 2019 adalah **SANGAT TINGGI**, nilai ini masih sementara karena belum dapat dihitung masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pencapaian capaian kinerja dapat dilihat dari hasil evaluasi masing-masing tataran antara lain tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan dan pelaksana urusan pemerintahan. Dari 13 (tiga belas) aspek tataran pengambil kebijakan dan 2 (dua) aspek tataran pelaksana kebijakan diperoleh nilai 3,172. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

- Komitmen yang tinggi dari seluruh Pimpinan sampai dengan level staf.
- Sumber daya manusia yang berfungsi secara maksimal.
- Koordinasi yang baik dengan seluruh SKPD.

Langkah strategis yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD.
- Meningkatkan kompetensi SDM penyusun LPPD melalui bimtek/sosialisasi.
- Melaksanakan verifikasi secara terus menerus terhadap data pendukung dan elemen data.

c. Opini BPK

Opini atas audit BPK, merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini atas audit yang dilaksanakan oleh BPK tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendapatkan penilaian Opini atas audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai

tahun 2012 sampai dengan 2019. Keberhasilan pencapaian opini WTP ini dikarenakan :

- Komitmen dan dukungan penuh dari Kepala Daerah beserta jajarannya.
- Penatausahaan keuangan dan asset telah sesuai dengan kaidah dalam SAP.
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- Kerjasama yang baik antara SKPKD dan SKPD dalam menyelenggarakan proses akuntansi dan penyediaan data-data keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penggunaan aplikasi yang handal baik SIMDA Keuangan, Simda BMD dan aplikasi penunjang lainnya, disertai dengan penggunaan teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi serta mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan :

- Masih adanya temuan BPK pada masa lalu yang belum ditindaklanjuti.
- Jumlah satuan pendidikan dasar yang banyak (581 sakdikdas) yang tersebar di seluruh wilayah ponorogo menyebabkan proses laporan BOS SD mengalami keterlambatan.
- Masih ditemukan adanya aset tetap yang belum tercatat sesuai ketentuan yaitu tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.
- Belum adanya aplikasi terintegrasi khusus pengelolaan persediaan barang habis pakai pada SKPD.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

- Mempertahankan kinerja dan komitmen mulai dari Pimpinan hingga pelaksana kegiatan.
- Secara berkala perlu adanya evaluasi yang mendukung progres tindak lanjut BPK, melakukan komunikasi dengan pihak terkait dan BPK untuk temuan di masa lalu yang tidak bisa ditindaklanjuti
- Menggunakan aplikasi BOS yang terhubung secara online dengan satuan pendidikan dasar/sekolah dan terintegrasi dengan Simda Keuangan
- Penyusunan road map inventarisasi aset tetap tanah dibawah jalan dan saluran irigasi dan pelaksanaan inventarisasi sesuai road map yang dimaksud
- Mengembangkan atau pengadaan aplikasi persediaan secara online dan terintegrasi dengan Simda Keuangan

3. **Sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan,** dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Merupakan salah satu cara untuk mengukur profesionalitas ASN. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi, pendidikan, kinerja, disiplin dan kompetensi.

Target tahun 2019 sebesar 86,60 dengan realisasi sebesar 80,80 dengan capaian 93,30% masuk kategori **BAIK**. Dari hasil pengukuran 4 (empat) dimensi pengukuran tingkat profesionalitas ASN diperoleh nilai untuk dimensi *Pendidikan* diperoleh nilai sebesar 114.830 dari jumlah ASN sejumlah 9.332 orang sejumlah 2.258 orang berpendidikan SMA – D2, untuk dimensi *Kinerja* diperoleh nilai sebesar 233.070 dimana dari jumlah ASN sejumlah 9.332 orang sebagian besar memperoleh nilai SKP Baik, untuk dimensi *Disiplin* diperoleh nilai sebesar 46.614 dimana jumlah ASN sejumlah 9.332 orang terdapat 23 orang yang melanggar peraturan disiplin ASN dan untuk dimensi *Kompetensi* diperoleh nilai sebesar 360.000 dimana dari jumlah ASN sejumlah 9.332 orang 886 orang diantaranya adalah pejabat struktural dan sebagian besar belum mengikuti Diklatpim. Ketidakberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

- Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang

  Pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.
- Lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

  Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan dating adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS melalui melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.
- Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan

efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan.

2. **Misi Kedua**, Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah, dengan **Tujuan kedua Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah.**

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Persentase pertumbuhan usaha mikro	1,85%	1,79%	1,7%	91,89%	1,9%	89,47%
2.	Persentase koperasi sehat	20%	20,12%	29%	145%	22%	131,82%
3.	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27%	0,24%	0,27%	100%	0,33%	81,82%
4.	Persentase PDRB sektor perdagangan	16,95%	17,84%	16,92%*	99,82%	17,15%	98,66%
5.	Persentase PDRB sektor industri	7,05%	7,15%	7,15%*	101,42%	7,15%	100%
6.	Jumlah kunjungan wisata	482.464	538.305	1.123.063	232,78%	531.916	211,14%
7.	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN	2%	117,91%	99,04%	4.952%	2%	4.952%

1. **Tujuan Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah** dicapai dengan sasaran dan indikator :

   a. Persentase pertumbuhan usaha mikro.

   Usaha mikro adalah usaha yang bergerak di sektor makanan minuman, kerajinan, dan sandang/pakaian. Pertumbuhan usaha mikro

dipengaruhi oleh peningkatan kinerja dari pengusaha mikro dan penambahan wirausaha baru dari pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan tahun 2019. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain pelatihan pembuatan aneka kue kering, kue basah, dan makanan olahan olahan berbahan dasar susu yang yang diikuti oleh UKM di ponorogo.

Untuk memperluas pemasaran produk didukung dengan memberikan fasilitasi pada UKM dengan mengikutkan pada kegiatan pameran. Pameran yang dilaksanakan antara lain Pameran dalam rangka Hari Koperasi (Harkop), Pameran Grebeg Suro, Pameran Nasional dan Pameran Regional. Selain itu pengembangan UKM juga dilakukan dengan memusatkan para pedagang PK5 di satu titik tempat di jalan baru atau lebih dikenal dengan kawasan sentra PK5. Pemasaran produk secara online melalui bukalapak juga bisa dilakukan di era digital ini, sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan usaha mikro.

Prosentase pertumbuhan usaha mikro tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,85% terealisasi sebesar 1,79% dengan capaian sebesar 91,89% masuk kategori **BAIK.** Jumlah usaha mikro tahun 2019 sejumlah 35.833 unit usaha mikro, mengalami peningkatan sebesar 263 unit usaha mikro dibandingkan tahun 2018 sebesar 15.473 unit usaha mikro. Ketidaktercapaian target kinerja dikarenakan :

- Fluktuasi bahan baku yang tidak menentu (harga tidak stabil), selain itu juga karena adanya persaingan antar usaha yang sejenis.
- Minat masyarakat untuk membuka usaha masih kecil, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja ditempat lain dengan penghasilan yang pasti.
- Sulitnya akses permodalan bagi usaha mikro.
- Kesulitan menentukan harga jual sehingga usaha mikro bertahan untuk tidak berproduksi atau berproduksi berdasarkan pesanan saja. Dengan kondisi tersebut maka omset penjualan kurang maksimal artinya tidak sesuai dengan kemampuan atau kapasitas produk.
- Terbatasnya anggaran untuk pelatihan bagi masyarakat sehingga pelatihan yang dilaksanakan hanya mencakup sebagian kecil masyarakat Kabupaten Ponorogo dan pelatihan yang telah dilaksanakan tidak bisa ditindaklajuti dengan kegiatan yang lebih intensif.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang :

- Inventarisir kebutuhan bahan baku dari usaha mikro untuk kemudian dibuat strategi untuk stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok. Operasi pasar merupakan salah satu untuk stabilisasi harga pokok yang perlu ditingkatkan baik dari volume barang maupun diperpanjang jangka waktu sampai dengan harga kebutuhan bahan baku menjadi stabil.
- Merubah pola pikir masyarakat dengan memotivasi, peningkatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat dan memberi bukti nyata bahwa memulai usaha itu tidak sesulit yang masyarakat bayangkan.
- Memfasilitasi promosi pemasaran produk-produk hasil wirausaha pemula/baru untuk mendongkrak dan memperlancar pemasaran produk tersebut.

Tabel 3.5

Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2016-2019

Tahun	Uraian	Jumlah	Peningkatan	% Peningkatan
2016	**Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**	**34.677**		
	Usaha Mikro	14.936	202	1,37
	Usaha Kecil Menengah	12.326		
	Usaha tidak aktif	7.415		
2017	**Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**	**35.167**		
	Usaha Mikro	15.201	265	1,77
	Usaha Kecil Menengah	12.567		
	Usaha tidak aktif	7.399		
2018	**Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**	**35.439**		
	Usaha Mikro	15.473	272	1,79
	Usaha Kecil Menengah	12.567		
	Usaha tidak aktif	7.399		
2019	**Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**	**35.833**		
	Usaha Mikro	15.736	263	1,70
	Usaha Kecil Menengah	12.649		
	Usaha tidak aktif	7.448		

Sumber: Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, 2019

b. Persentase koperasi sehat

Persentase koperasi berkategori sehat dari jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan pada tahun 2019. Koperasi yang masuk dalam kategori sehat terbagi menjadi 2 yaitu koperasi sehat dan cukup sehat. Kemudian koperasi tidak sehat terbagi menjadi koperasi dalam

pengawasan dan pengawasan khusus. Penilaian kesehatan pada tahun 2019 sebanyak 101 unit koperasi dengan hasil 101 unit koperasi tersebut berkategori sehat yang terbagi menjadi 15 koperasi sehat dan 86 unit koperasi cukup sehat. Sampai dengan tahun 2019 jumlah koperasi sehat sebanyak 303 unit koperasi dari total 1.016 unit koperasi. Prosentase koperasi sehat tahun 2019 ditargetkan sebesar 20% terealisasi sebesar 29% dengan capaian sebesar 145% masuk kategori sangat **BAIK**. Keberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

- Tingkat likuiditas dari beberapa koperasi yang dilakukan penilaian mempunyai nilai yang bagus sehingga mempengaruhi kesehatan koperasi
- Pemahaman dan kesadaran koperasi akan arti kesehatan koperasi itu sendiri yang sangat mendukung tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga koperasi selalu berlomba untuk mendapatkan predikat tersebut.
- Peningkatan kinerja koperasi. Kinerja koperasi dapat dilihat dari kenaikan SHU, kenaikan partisipasi permodalan dari anggota yang berupa simpanan-simpanan yang dibayar oleh anggota. Selain itu adanya penurunan resiko usaha yang berupa penurunan jumlah pinjaman bermasalah yang berpotensi resiko.

Permasalahan :

- Adanya peraturan dalam usaha khususnya terkait usaha dalam bidang pembiayaan/usaha terkait bidang keuangan. Dimana banyak lembaga keuangan yang beroperasi/melaksanakan kegiatan usaha sampai wilayah terkecil di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut membuat persaingan usaha di bidang keuangan sangat ketat. Persaingan yang ketat membuat beberapa koperasi mengalami penurunan volume usaha yang berdampak pada penurunan capaian Sisa hasil Usaha (SHU).
- Penilaian kesehatan koperasi yang tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh.
- Minimnya tenaga penilai kesehatan koperasi yang mempunyai sertifikat penilai kesehatan.

Rencana tindak lanjut :

- Melakukan pembinaan dan pelatihan agar kegiatan simpan pinjam koperasi mampu memberikan pelayanan terbaik dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.
- Mengikutkan pendidikan dan pelatihan penilai kesehatan koperasi untuk menciptakan tenaga penilai kesehatan koperasi.

- Memberikan motivasi agar koperasi membuka usaha baru selain simpan pinjam. Usaha baru tersebut diharapkan akan berjalan atau bahkan mampu mengimbangi kegiatan usaha simpan pinjam yang mempunyai kecenderungan semakin menurun.

2. **Sasaran Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan**, dengan indikator :

a. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.

IKM terdiri dari pangan (makanan ringan), sandang (batik/konveksi), kerajinan (tas dan bordir). Dari ketiga Industri Kecil Menengah (IKM) tersebut yang paling pesat pertumbuhannya yaitu IKM pangan/makanan ringan seperti keripik dan roti, dikarenakan penjualan relatif lancar dan perputaran modal relatif cepat, bahkan ada beberapa IKM kerajinan yang beralih ke produksi makanan. Untuk menunjang peningkatan mutu produk makan minum maka dilakukan pembinaan kepada IKM dengan memberikan fasilitasi Ijin Edar (PIRT), Hak Merk, Uji Nutrisi dan sertifikat halal (dari provinsi Jawa Timur). Di sektor sandang dan kerajinan, pertumbuhan IKM nya relatif sedang, oleh karena itu perlu diadakannya pelatihan bordir, batik, gamelan, dan reyog. Untuk membantu IKM dalam memasarkan produk produknya, kita juga menyediakan pelatihan pembuatan batik, gamelan, reyog, pengemasan produk, serta pembuatan label di UPTD sentra industri.

Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2019 ditargetkan sebsar 0,27% terealisasi 0,27%, dengan capaian sebesar 100% masuk kategori **BAIK**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan ;

- Fasilitasi/pelatihan kepada IKM dari industri rumahan menjadi wirausaha baru yang responsive gender.
- Pemasaran produk dengan mengikutkan IKM di pameran lokal dan pameran nasional.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang adalah :

- Pemberian pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat..
- Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat.
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM IKM.
- Pembangunan dan pengembangan lingkungan industri.

Tabel 3.6

Pertumbuhan IKM Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah IKM	Peningkatan	% Peningkatan
1	2015	16.418	-	-
2	2016	16.431	13	0,08
3	2017	16.464	33	0,20
4	2018	16.503	39	0,24
5	2019	16.547	44	0,17

Sumber: Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, 2019

b. Persentase PDRB sektor perdagangan

Kontribusi PDRB sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 16,95% terealisasi sebesar 16,92%* dengan capaian sebesar 99,82% masuk kategori **BAIK.** Nilai tersebut merupakan nilai estimasi sementara dikarenakan nilai tahun 2019 belum dirilis resmi oleh BPS Kabupaten Ponorogo. Ketidakberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan pemenuhan karcis retribusi pasar daerah **yang hanya tercapai 96,35% dari target 100%. Hal tersebut dikarenakan ada 3 pasar yang belum boleh ditarik retribusi yaitu Pasar Bungkal, Pasar Sawoo, dan Pasar Sumoroto, dikarenakan dibangun menggunakan dana TP APBN, dan pasar belum dihibahkan ke Pemda, sehingga belum boleh dipungut retribusi.**

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- Menunggu rilis resmi dari BPS.
- Melaksanakan e-retribusi pada pasar daerah.
- Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (fasilitasi pameran tingkat lokal maupun nasional).
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru; dan
- Menentukan indikator sasaran yang measurable/dapat diukur sendiri.

c. Persentase PDRB sektor industri

Kontribusi PDRB sektor industri meliputi industri pengolahan terhadap Total PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2019 adalah 7,15%*. Nilai tersebut merupakan nilai estimasi sementara yang mengacu pada Nilai Kontribusi PDRB tahun 2018 dikarenakan nilai tahun 2019 belum dirilis resmi oleh BPS Kabupaten Ponorogo.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- Menunggu rilis resmi dari BPS.
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru.
- Menentukan indikator sasaran yang measurable/dapat diukur oleh instansi terkait.

3. **Sasaran Optimalisasi sektor pariwisata** dengan indikator Jumlah kunjungan wisata.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo merupakan tolak ukur tentang optimal tidaknya pengelolaan wisata baik jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo baik sektor pariwisata, UMKM, Industri lainnya, karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka semakin banyak pula pendapatan dari berbagai sektor pendukung diantaranya jumlah hunian hotel, rumah makan, souvenir dan lain sebagainya, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) pun meningkat.

Tahun 2019 merupakan Tahun Kunjungan Wisata, oleh sebab itu pengelolaan wisata, sarana dan prasarana, obyek wisata serta sumber daya manusia pariwisata harus lebih meningkat sehingga tahun kunjungan wisata bisa tercapai dengan baik serta pendapatan asli daerah meningkat. Target tahun 2019 sebesar 482.464 wisatawan terealisasi sebesar 1.123.063 wisatawan dengan capaian sebesar 232,78% masuk kategori **SANGAT BAIK.**

Jumlah obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Ponorogo sejumlah 23 (dua puluh tiga) obyek. Pemaksimalan teknologi informasi dan juga menggandeng pegiat media sosial merupakan strategi yang sangat bagus dalam promosi pariwisata yang diharapkan mampu menarik wisatawan ke Kabupaten Ponorogo sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor kepariwisataan dengan adanya obyek wisata budaya, seperti Reyog yang dilestarikan pada Kegiatan Festival Nasional Reyog Ponorogo dalam acara Grebeg Suro, Festival Reyog Mini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ponorogo dan acara lain yang dapat mendukung meliputi kegiatan Pentas Reyog Bulan Purnama, Pentas Reyog Telaga Ngebel dan Larungan Telaga Ngebel. Pada tahun 2019 juga diadakan Event besar diantaranya Batik On The Street, Pemilihan Duta Wisata Cilik Thole Gendhuk, Pemilihan Duta Wisata Kakang Senduk, Gebyar Jathil,

Festival Topeng Internasional, Parade dan Pentas Jaranan Thik, Reyog Jazz di Telaga Ngebel, Festival Kopi, Lomba Nyethe, Festival Jajanan Khas Ponorogo, Festival Sate Khas Ponorogo, Festival Angkringan dan Pesta Durian merupakan suatu nilai tersendiri dalam menarik simpatik para wisatawan untuk berkunjung Ke Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kegiatan pariwisata.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pariwisata di tahun 2019 juga mengadakan Festival Dalang Bocah dengan tujuan melestarikan nilai budaya sehingga tidak punah dan regenerasi.

Selain itu dengan memaksimalkan peran aktif masyarakat melalui kelompok sadar wisata dan berkembangnya desa wisata yang menonjolkan adat istiadat desa dan kegiatan masyarakat sehingga ini dapat memicu para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang menginginkan wisata khas desa. Dengan bertambahnya jumlah desa wisata yang berjumlah 70 desa wisata berarti menambah destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Ponorogo bukan hanya destinasi wisata alam, budaya, kuliner dan buatan namun menambah destinasi baru yang disebut dengan Destinasi Masyarakat Desa yang merupakan destinasi yang mengambil kebiasaan masyarakat desa dalam kehidupan sehari hari dan ini yang dapat menambah minat wisatawan untuk merasakan bagaimana menjadi bagian masyarakat desa.

Permasalahan :

- Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan Pokdarwis
- Kurangnya dukungan sektor pendukung (sarana prasarana) pariwisata di obyek wisata

Rencana tindak lanjut :

- Mengadakan kerjasama dengan Kabupaten sekitar untuk mengintegrasikan potensi wisata unggulan daerah.
- Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan pelayanan wisatawan.
- Meningkatkan kesadaran terhadap Sapta Pesona Pariwisata serta fasilitas Sarana di ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata).
- Mengadakan kerjasama dengan para sektor pendukung pariwisata untuk mengoptimalkan fungsinya.

Berikut gambaran jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019.

Tabel 3.7

Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah
1	2015	65	249.229	249.294
2	2016	312	345.818	346.130
3	2017	320	336.475	336.795
4	2018	347	538.305	538.652
5	2019	259	1.122.804	1.123.063

Sumber: Disparbudpora Kabupaten Ponorogo, 2019

4. **Sasaran Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah,** dengan indikator Persentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN

Peran pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan guna untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah telah berupaya menyikapi perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanaman modal yang konsisten dan berkelanjutan.

Kabupaten Ponorogo adalah daerah yang sangat potensial untuk invetasi, potensi dan fasilitas infrastruktur, kemudahan investasi dan dukungan dalam menerima calon investor menjadi daya tarik yang kuat bagi investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Adapun faktor-faktor lain penunjang perkembangan investasi di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah :

- Adanya basis data yang berisi informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, daya dukung lingkungan dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) di Kabupaten Ponorogo.
- Adanya peta potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, daya dukung lingkungan dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) di Kabupaten Ponorogo yang dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi di Kabupaten Ponorogo.
- Peta potensi dan peluang investasi dan arahan investasi secara spasial pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
- Adanya sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ponorogo kepada Masyarakat melalui Aparatur Kecamatan.
- Adanya kemudahan berusaha dari kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- Diberlakukannya OSS (Online Single Submission) , dimana pengurusan perijinan semakin mudah, bisa dilakukan online dan mandiri.

Peranan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan guna untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah telah berupaya menyikapi perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanaman modal yang konsisten dan berkelanjutan.

Kabupaten Ponorogo adalah daerah yang sangat potensial untuk invetasi, potensi dan fasilitas infrastruktur, kemudahan investasi dan dukungan dalam menerima calon investor menjadi daya tarik yang kuat bagi investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Target tahun 2019 sebesar 2% dan terealisasi sebesar 99,04% dengan capaian kinerja 4.952% masuk kategori **SANGAT BAIK**. Nilai investasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp.1.284.897.499.577,00 ada peningkatan Rp.639.376.858.338,00 dibandingkan dengan nilai tahun 2018 sebesar Rp.645.520.641.239,00. Berikut data investasi di Kabupaten Ponorogo tahun 2019.

Tabel 3.8

Data Ivestasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

NO.	SEKTOR USAHA	JUMLAH
1.	Perdagangan	539.589.620.981
2.	Perindustrian	27.052.976.076
3.	Pendidikan dan Kebudayaan	12.358.120.800
4.	Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	105.863.337.444
5.	Kesehatan	463.176.052.074
6.	Energi dan Sumber Daya Mineral	2.397.956.680
7.	Komunikasi dan Informatika	2.418.000.000
8.	Pariwisata	37.433.470.301
9.	Perhubungan	20.128.567.042
10.	Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	614.000.000
11.	Pertanian	8.546.210.000
12.	Dalam Negeri	7.962.880.000
13.	Pertahanan	4.896.000.000
14.	Kelautan dan Perikanan	1.565.000.000
15.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.400.000.000
16.	Ketenagakerjaan	7.405.471.080
17.	Keuangan	38.989.837.099
18.	Agama	-
19.	Luar Negeri	100.000.000
TOTAL JUMLAH INVESTASI		**1.284.897.499.577**

Sumber: DPM PTSP Kabupaten Ponorogo, 2019

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- Adanya SOTK baru yang semakin membuat struktur organisasi lebih terarah dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP.
- Adanya dukungan dan komitmen dari para stakeholders.
- Percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi salah satunya dengan aplikasi Sijitu dan OSS.
- Tersedianya jaringan infrastruktur.

Permasalahan :

- Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal.
- Belum optimalnya sosialisasi tentang DPM PTSP.
- Masyarakat belum dapat menerima secara terbuka terhadap investor baru yang ingin berinvestasi.
- Kemampuan dan budaya kerja aparatur SDM DPM PTSP tidak merata.
- Belum optimalnya pengawasan perizinan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi pada khususnya.
- Kurang ketersediaan *marketing tools* daerah dan kegiatan pembukaan serta pencarian pasar untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.
- Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi.

Rencana tindak lanjut :

- Menyusun rancangan pedoman pelaksanaan penanaman modal.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang DPM PTSP kepada masyarakat di daerah (Kecamatan).
- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui bimtek, pelatihan, studi banding, dll.
- Peningkatan pengawasan perizinan dan mengoptimalkan penanganan/penyelesaian pengaduan akibat penerbitan izin.
- Melakukan telaah tentang kelebihan dan kekurangan daerah yang dapat dijadikan bahan pembantu dalam perencanaan investasi di daerah .
- Pemanfaatan teknologi guna membantu kelancaran dalam masing-masing kegiatan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu dan Program akuntabilitas di

bidang perijinan. Berikut pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 s.d. 2019.

Tabel 3.9

Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2019

No.	Tahun	Nilai Investasi	Pertumbuhan	%
1	2014	350.890.412.617,00	343.560.306.987,00	-
2	2015	1.463.909.736.548,00	1.113.019.323.931,00	317,20
3	2016	251.348.323.200,00	(1.212.561.413.348,00)	(82,83)
4	2017	296.225.492.446,00	44.877.169.246,00	17,85
5	2018	645.520.641.239,00	349.295.148.793,00	117,91
6	2019	1.284.897.499.577,00	639.376.858.338,00	99,05

Sumber: DPM PTSP Kabupaten Ponorogo, 2019

3. **Misi Ketiga**, Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan **Tujuan ketiga Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab.**

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik	70%	66,58%	68,48%	97,83%	74%	92,54%

Tujuan **Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab** dicapai dengan sasaran **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar**, dengan indikator :

1. **Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik**.

Infrastruktur publik dalam kondisi baik, target tahun 2019 sebesar 70% terealisasi sebesar 68,48% dengan capaian sebesar 97,83% masuk kategori **BAIK.** Panjang jalan Kabupaten Ponorogo dengan total panjang ruas 916,110 km, dimana 572,35 km dalam kondisi baik, 173,45 km dalam kondisi sedang dan 115,70 km dalam kondisi rusak serta 54,61 km dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2019 dilaksanakan pembangunan jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan di 21 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan di arahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk yang semakin tinggi diperlukan prasarana berupa jalan yang baik. Untuk itu sudah menjadi

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten untuk menjaga tingkat kualitas jalan yang telah dimilikinya baik berupa pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan.

Jumlah jembatan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 383 jembatan, dimana 358 dalam kondisi baik, 19 jembatan dalam kondisi rusak ringan, 6 dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2019 dilaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan. Tujuan kegiatan ini untuk menunjang pemenuhan kebutuhan prasaran penunjang jalan berupa jembatan yang kuat dan aman. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjaga kondisi jembatan agar berfungsi sesuai umur jembatan, baik berupa pemeliharaan, pelebaran maupun pembangunan.

Panjang saluran irigasi dengan panjang total 906.955 m, dimana 435.195 dalam kondisi baik, 153.230 m dalam kondisi sedang, 26.448 m dalam kondisi rusak ringan dan 292.084 m dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi yaitu peningkatan kondisi dan fungsi bendung, perbaikan saluran irigasi sebanyak 16 jaringan irigasi, rehabilitasi tangkis kali dan pemeliharaan saluran irigasi di wilayah 5 UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat petani pemakai air diperlukan adanya jaringan irigasi yang memadai. Jaringan irigasi diperlukan untuk mendistribusikan pasokan air khususnya bagi lahan pertanian. Dengan bertambahnya dan semakin baiknya jaringan irigasi yang ada maka diharapkan akan meningkatkan luas areal irigasi sehingga akan meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketidakberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

- Faktor cuaca yang tidak menentu/ekstrem sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga bisa menimbulkan efek memperpendek umur bangunan.
- Kualitas konstruksi bangunan yang sangat buruk.

Permasalahan :

- Kerusakan jalan banyak di akibatkan karena beban kendaraan yang melintas melebihi beban yang di rencanakan akibat banyaknya kendaraan barang yang melintas melebihi kapasitas seharusnya (overload), jumlah kendaraan yang berkembang sangat signifikan, sehingga jalan menjadi cepat rusak.
- Menurunnya Kualitas Saluran Irigasi disebabkan belum Optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada Baku Sawah di wilayah Kabupaten Ponorogo

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi
- Curah hujan yang tinggi sehingga kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi sehingga dapat menyebabkan rusaknya Jaringan Irigasi.

Rencana tindak lanjut :

- Meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang lebih lancar, tertib dan selamat serta mampu segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Menyiapkan struktur perkerasan jalan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada.
- Membuat gorong-gorong atau saluran yang baik dan memadai.
- Pembuatan sumur resapan supaya mempercepat aliran air sehingga fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik.
- Pembangunan drainase jalan yang baik sehingga pada waktu hujan tidak terjadi genangan air pada jalan yang bisa merusak struktur jalan.

4. **Misi Keempat**, Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh, dengan **Tujuan keempat Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing.**

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Nilai tukar petani	106,84	111,01	115,39*	108%	107,85	106,99%
2.	Persentase Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,50%	1,04%**	1,58%**	63,20%	2,50%	63,20%
3.	Angka kecukupan pangan utama	163.070,50	145.107,30	151.976,50	93,20%	173.170,60	87,76%

Tujuan **Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing**, dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani**, dengan indikator :

   a. Nilai Tukar Petani (NTP).

   Tingkat daya beli petani merupakan salah satu indikator dalam pembangunan sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli petani. Semakin tinggi NTP, semakin tinggi nilai NTP, semakin tinggi daya belinya, yang juga berarti semakin sejahtera kehidupan petani. Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang harus dibayar petani. NTP menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai NTP, maka semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relative lebih sejahtera.

   Secara umum nilai tukar petani (NTP) dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terus, dimana pada tahun 2017 sebesar 110,68, tahun 2018 sebesar 111,01 dan pada tahun 2019 sebesar 115,39* dengan capaian 108% masuk kategori **SANGAT BAIK**, mengalami peningkatan sebesar 4,38 dibandingkan tahun 2018, hal ini berarti terjadi peningkatan kesejahteraan petani. NTP diukur dengan menggunakan parameter pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan sub sektor perikanan, yang semuanya mengalami kenaikan, sehingga secara langsung indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

   - Adanya bantuan POC dan sarana produksi dari pemerintah
   - Berkurangnya biaya pengeluaran untuk pembelian saprodi
   - Tersedianya infrastruktur yang memadai

   Permasalahan :

   - Sulitnya pengendalian harga barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga pertanian dan harga barang/jasa untuk memproduksi hasil pertanian.
   - Kenaikan harga barang/jasa yang dibayar petani lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh inflasi indeks harga konsumen yang juga meningkat.
   - Petani masih menggunakan cara konvensional dan masih sulit untuk lebih maju.

Rencana tindak lanjut :

- Inventarisasi, identifikasi dan verifikasi kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Pemberian bantuan alsintan kepada Poktan masih akan dilanjutkan.
- Fasilitasi e-RDKK dan AUTP bagi kelompok tani.
- Fasilitasi peningkatan ketrampilan petani dalam penangkaran benih.
- Pelatihan pasca panen padi dan penyaluran bantuan alat panen.
- Melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan melalui penerapan sistem pertanian organik.
- Demplot pertanian organik.
- Diklat management Gapoktan/Poktan.
- Coaching penyuluhan bagi penyuluh Swadaya, PP-PNS, THL-TBPP.
- Fasilitasi dan penguatan kelembagaan Poktan tembakau.
- Pelatihan pasca panen tembakau dan pemberian bantuan alat pasca panen tembakau.
- Pembangunan prasarana perkebunan, pemberian bantuan alsintan serta pendampingan budidaya tembakau.
- Pengembangan bibit perkebunan unggulan.
- Pelatihan budidaya serta management agribisnis untuk ruminansia serta pendampingan budidaya tembakau.
- Pembangunan RPH lanjutan.
- Vaksinasi dan desinfeksi sebagai upaya pencagahan PHMS.
- Pelayanan gangguan reproduksi hewan.

b. Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga untuk barang/jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Indikator Pertumbuhan nilai PDRB pertanian (sub kategori pertanian dan perikanan) yang mengacu dari harga konstan (2010) untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha pertanian (sub kategori pertanian dan perikanan) dari tahun ke tahun. Meliputi semua komoditas yang mencakup pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta produksi perikanan baik pembenihan, pembudidayaan maupun penangkapan. Angka PDRB tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 masih dalam tahap proses penghitungan, oleh karena itu data yang kami sajikan merupakan data sangat sementara .

Untuk lapangan usaha pertanian dihitung dari sub kategori pertanian ditambah sub kategori perikanan, nilai PDRB berdasarkan ADHK sebesar Rp.3.470.602.000.000,00 NAIK sebesar 1,58% jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.416.530.000.000,00. Sub kategori pertanian menyumbang sebesar 95,04% dan perikanan 2%. Dengan demikian jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 2,5% mempunyai tingkat capaian sebesar 63,20% masuk kategori **CUKUP**. Selama 5 tahun terakhir kontribusi sub kategori pertanian dan perikanan jika dibandingkan dengan subkategori lainnya memang menunjukkan trend yang menurun, namun demikian jika melihat pertumbuhan nilai dari kedua kategori ini, walaupun fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,33% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya angka sementara menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai PDRB, khususnya dari sub kategori pertanian menunjukkan peningkatan, hal ini dikarenakan pada komoditas utama tanaman pangan terutama kacang tanah mengalami kenaikan produksi sebesar 29,38% menjadi 23.208 ku. Pada tahun 2019 selain luas panen meningkat, dari sisi produktivitas juga mengalami kenaikan sebesar 14,11% menjadi 14,52 ku/ha. Demikian juga dengan komoditas pangan unggulan lainnya yaitu jagung luas panen meningkat 11,22% menjadi 44.790 ha dengan capaian tingkat produksi sebesar 2.898.953 ku, meningkat 14,92%. Komoditas lainnya yang mengalami peningkatan adalah kedelai, dimana capaian tingkat produksi sebesar 51.299 ku, meningkat 10,13%. Namun sayangnya peningkatan produksi tanaman pangan tersebut tidak dibarengi dengan tanaman pangan padi dan ubi kayu yang justru produksinya mengalami penurunan dikarenakan terjadi kemarau yang panjang sehingga banyak petani yang mengalihkan penanamannya dari yang semula ditanami padi diganti dengan tanam jagung. Dari sisi harga jual di tingkat produsen/petani pada tahun 2019 untuk komoditas padi berupa gabah kering giling (GKG) sebesar 5.400 Rp/kg meningkat 9,64% sedangkan untuk komoditas jagung berupa pipil kering harga turun sebesar 3,45% dari yang semula 4.350 Rp/kg menjadi 4.200 Rp/kg. Pada tahun 2019 harga komoditas pangan utama relatif stabil, sehingga jika dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhan nilai PDRB mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Demikian pula dari sub kategori perikanan dalam kurun waktu 5 tahun pertumbuhan nilai PDRB cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 data menunjukkan bahwa produksi perikanan baik kolam maupun perairan umum meningkat sebesar 5,05% menjadi 2.034,67 ton.

Permasalahan :

- Menurunnya produksi dan produktivitas beberapa komoditas pertanian;
- Menurunnya produksi beberapa tanaman perkebunan;
- Belum optimalnya pengembangan potensi budidaya perikanan.

Rencana tindak lanjut :

- Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi pertanian maupun pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian/perkebunan;
- Berkoordinasi dengan BMKG dalam mitigasi iklim dan curah hujan sehingga bisa meramalkan kalender tanam, dan petani dapat menanam komoditi yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya puso sebagai dampak anomali iklim, baik dari segi kebencanaan maupun serangan wabah OPT;
- Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis;
- Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan;
- Mendorong POKDAKAN agar mengembangkan agribisnis perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- Fasilitasi pembetukan UPR dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan UPR.

c. Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator Angka kecukupan pangan utama.

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain, orientasi terhadap rumah tangga/ individu, akses ketersediaan pangan baik secara fisik, ekonomi dan sosial, berorientasi untuk pemenuhan gizi serta bertujuan untuk hidup lebih sehat dan produktif. Sehingga tercermin terpenuhinya pangan rumah tangga baik yang berasal dari tanaman, ternak maupun ikan dengan kondisi cukup, aman/bebas dari penyakit dan sesuai kaidah agama, merata serta terjangkau.

Angka kecukupan pangan utama pada tahun 2019 adalah 151.976,5 dengan tingkat capaian sebesar 93,20% masuk kategori **BAIK**. Jika dibandingkan tahun sebelumnya maka mengalami peningkatan sebesar 4,73%, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain bahwa produksi

pertanian, walaupun pada tahun 2019 cenderung fluktuatif untuk produksi tanaman pangan unggulan, namun demikian masih bisa mencukupi kebutuhan individu/ rumah tangga. Berdasarkan data dari dinas pertanian produksi padi pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan namun demikian untuk pangan utama lain seperti jagung, kacang tanah dan kedelai mengalami kenaikan. Demikian pula untuk produksi peternakan (susu, daging, telur) dan perikanan, sebagai komoditi pemenuhan pangan hewani cenderung mengalami peningkatan. Selain faktor-faktor tersebut diatas beberapa faktor eksternal juga turut berpengaruh, antara lain adalah sarana prasarana terkait akses distribusi pangan, faktor anomali iklim pada tahun 2019 dengan komposisi hari hujan yang pendek, kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat.

Permasalahan :

- Masih rendahnya konsumsi pangan lokal, terutama umbi-umbian, sayur dan buah yang tercermin pada pencapaian skor pola pangan harapan
- Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).
- Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan masyarakat, sebagaimana tercermin dari dari kurang aktifnya lumbung pangan dan warung desa.
- Adanya desa dengan KK miskin diatas 20% sehingga mendesak untuk ditangani.
- Masih banyak beredarnya bahan pangan yang kurang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan seperti penggunaan bahan tambahan (pewarna, pengawet, pemutih) yang berbahaya, pangan tanpa tanggal kadaluwarsa, belum ada ijin PIRT.

Rencana tindak lanjut :

- Banyaknya potensi pangan lokal yang belum digali secara optimal.
- Semakin meningkatnya jumlah pengolah pangan lokal.
- Dukungan akademisi dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- Adanya kebijakan pemerintah dalam penumbuhan cadangan pangan pemerintah maupun cadangan di tiap kelurahan berupa lumbung pangan maupun warung desa serta adanya kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Dibentuknya Tim jejaring keamanan pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo akan memudahkan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang sinergi.

5. **Misi Kelima**, Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan, dengan **Tujuan kelima Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat.**

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Persentase Permukiman sehat	76,78%	75,68%	76,75%	99,96%	78,57%	97,68%
2.	Indek kualitas lingkungan hidup	68,91	72,48	70,54	102,37%	70	100,77%

Tujuan **Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatkan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat,** dengan indikator Persentase permukiman sehat.

   Permukiman sehat dan nyaman adalah permukiman yang memprioritaskan pada penyediaan kawasan yang nyaman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Kawasan yang nyaman yang dimaksud adalah kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi warga masyarakat yang tinggal didaerah tersebut mulai dari rumah layak huni, ketersediaan air bersih yang memadai, sanitasi yang sehat, bangunan ber IMB hingga tersedianya ruang bagi warga masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama dalam berbagai aktivitas .

   Permukiman sehat Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2019 dengan target sebesar 76,78% terealisasi sebesar 76,75% dengan capaian sebesar 99,96% masuk kategori **BAIK.** Untuk memenuhi permukiman sehat di Kabupaten Ponorogo dengan melakukan pendataan-pendataan baik kebutuhan perumahan, air bersih, sanitasi dan pengurangan kawasan kumuh dengan capaian untuk ketersediaan rumah layak huni sebesar 93,55%, rumah tangga pengguna air bersih sebesar 95,12%, rumah tangga bersanitasi layak sebesar 79,73%, pengawasan bangunan yang memenuhi syarat teknis sebesar 4,52% dan pengurangan kawasan kumuh sebesar 5 ha. Selain itu juga didukung adanya dokumen-dokumen RAD, AMPL, SSK, peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap program-program kegiatan terutama program kegiatan yang berbasis masyarakat: Pamsimas, Sanimas, Kotaku, Pisew, BSPS, penguatan kelembagaan HIPPAMS yang aktif,

dukungan anggaran dan sarana prasarana yang ada dan koordinasi yang intens dengan instansi/Lembaga terkait.

Permasalahan :

- Belum mempunyai angka yang valid terkait "*backlog*" perumahan.
- Belum adanya data base jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
- Adanya wilayah-wilayah yang secara alamiah/geografis pada wilayah yang sulit/kekurangan air.
- Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang sulit berbagi sumber mata air maupun fungsi sarana prasarana yang ada.
- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik belum sesuai yang diharapkan.
- Belum adanya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik.
- Belum adanya data base jumlah bangunan pemerintah dan bangunan publik serta rumah tinggal.
- Kesadaran masyarakat akan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung masih belum optimal, IMB diajukan setelah bangunan selesai sehingga pemberian rekomendasi/persetujuan teknis bangunan gedung untuk IMB di lapangan sulit diterapkan.

Rencana tindak lanjut :

- Koordinasi dengan SKPD terkait (DINKES) untuk sosialisasi PHBS.
- Menyusun skala prioritas kegiatan.
- Menyusun database.
- Rehabilitasi jaringan perpipaan.
- Peningkatan kapasitas SPAM melalui penambahan kapasitas setempat, air baku, bak penampung, jaringan perpipapan SR (sambungan rumah).
- Pembangunan SPAM berbasis masyarakat.
- Pengawasan daerah tangkapan air minum.
- Pembinaan pemanfaatan lahan untuk pembuatan biopori.
- Pembuatan waduk/embung untuk penguapan penyimpanan air minum.

Segera dibuatkan perda/regulasi pengelolaan sistem penyediaan air minum.

2. **Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Ponorogo ditargetkan tahun 2019 sebesar 68,91 terealisasi sebesar 70,54 dengan capaian sebesar 102,37% masuk kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

- Adanya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi baik dari segi waktu pelaksanaan maupun dari jumlah titik yang akan diuji. Pengujian kualitas ABA yang direncanakan di 46 titik telah dilaksanakan sejumlah 46 titik, dan waktu pelaksanaannya adalah 2 kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan bulan Juli Tahun 2019.
- Tersedianya data pengujian kualitas udara ambien dari metode PS (Passive Sampler) di 4 titik lokasi selama 2 tahap.
- Adanya dukungan anggaran dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang dialokasikan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (ABA, udara ambien dan tanah).

Apabila dibandingkan dengan angka IKLH tahun 2018 dimana angka IKLH sebesar 72,48, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya indeks pencemaran air yang disebabkan oleh status mutu air dari 46 titik sampling, dimana jumlah titik sampling air badan air (ABA) dengan status “memenuhi” terdapat 26 titik (57%), jumlah titik sampling air badan air (ABA) dengan status “ringan” terdapat 15 titik (33%), jumlah titik sampling air badan air (ABA) dengan status “sedang” terdapat 2 titik (4%) dan jumlah titik sampling air badan air (ABA) dengan status “berat” terdapat 3 titik (7%). ABA dengan status mutu air “berat” yang tentunya juga dapat mempengaruhi penurunan nilai akhir IKLH. Beberapa faktor yang mempengaruhi status mutu air ketiga ABA tersebut “berat” antara lain adanya limbah cair dari usaha dan/atau kegiatan pabrik tahu di air sungai bawah Jembatan Desa Bedikulon dan limbah cair dari pabrik tepung di air sungai Mungkungan Tengah. Hal tersebut berdasarkan hasil laboratorium pengujian kualitas ABA dimana parameter kimia khususnya BOD dan COD di ketiga lokasi tersebut melebihi baku mutu, adanya hasil laboratorium pada parameter Fecal Coli yang menunjukkan angka 11.000 di air sungai Mungkungan tengah (baku mutu Fecal Coli : 2000). Sehingga masih terdapat limbah tinja yang dibuang ke air sungai tersebut dan aliran air sungai yang kecil, sehingga volume pengambilan air juga sedikit, terdapat banyak endapan, sehingga mempengaruhi hasil kualitas air yang belum optimal.

Upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas sungai antara lain :

- Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sekitar kawasan air sungai khususnya usaha dan/atau kegiatan yang pengelolaan limbahnya belum memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku;

- Pembuatan IPAL komunal yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat mengakomodir beban pencemaran dari beberapa usaha dan/atau kegiatan;
- Melibatkan peran serta dari masyarakat untuk turut membersihkan sungai/saluran terbuka yang terdapat sampah melalui gerakan masyarakat peduli air sungai;

Mengadakan pembinaan atau kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan terutama untuk tidak membuang sampah secara sembarangan ataupun membuang sampah langsung ke air badan air (ABA). Selain itu juga memberikan pemahaman tentang perlunya merubah perilaku masyarakat agak sejak dini dapat mengelola sendiri sampah yang dihasilkan dari masing – masing rumah tangga.

6. **Misi Keenam**, Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan, dengan **Tujuan keenam Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja serta penegakan hukum.**

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Angka pengangguran terbuka	7,40%	3,49%	3,33%	155%	7,30%	154,38%
2.	Persentase penurunan PMKS	2%	286,26%	7,64%	-182%	2%	-182%
3.	Indeks Desa Membangun	0,7759	0,7509	0,972*	125,27%	0,8461	114,88%
4.	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	55%	35,05%	55,10%	100,18%	100%	55,10%

Tujuan **Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja serta penegakan hukum,** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha**, dengan indikator Angka pengangguran terbuka.

   Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,40% dan terealisasi sebesar 3,33% dengan capaian sebesar 155% masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Capaian indikator kinerja sasaran tidak melebihi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo bisa dikurangi/diminimalisir yaitu melalui beberapa penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

   Jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, dimana jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 16.652 orang, dibandingkan dengan tahun 747 terjadi penurunan sejumlah 156 orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

   - Meningkatnya permintaan tenaga kerja/lowongan kerja.
   - Tersedianya informasi lowongan kerja yang luas (Bursa kerja online).
   - Penempatan/penyerapan tenaga kerja yang banyak.
   - Tingkat kompetensi pencari kerja yang memadai.
   - Adanya program perluasan kesempatan kerja seperti Tenaga Kerja Mandiri, Tehnologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya Produktif sehingga masyarakat/pencari kerja menjadi bisa bekerja/diberdayakan, karena kegiatan ini lebih mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

   Berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai target kinerja tahun yang akan datang yaitu *:*

   - Pendataan lowongan kerja ke perusahaan.
   - Melaksanakan Job Market Fair (JMF) di daerah.
   - Adanya program kegiatan penunjang yang dapat dan mampu menyerap tenaga kerja.
   - Pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat/pencari kerja.

   Berikut perkembangan jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019.

Tabel 3.14

Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten PonorogoTahun 2015-2019

No.	Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Persentase
1	2015	485.245	17.873	3,68%
2	2016	489.661	17.714	3,62%
3	2017	494.111	17.555	3,55%
4	2018	498.586	17.399	3,49%
5	2019	500.739	16.652	3,33%

Sumber: Disnaker Kabupaten Ponorogo, 2019

2. **Sasaran Menurunnya masalah kesejahteraan sosial**, dengan indikator Persentase penurunan PMKS.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seorang, keluarga atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. PMKS/masyarakat miskin selalu ada, karena hambatan, kesulitas dan gangguan tersebut dapat berupa angka kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS tersebut terdiri dari 26 jenis yang telah ada kriteria sendiri-sendiri dan telah diatur pada Kementerian Sosial yang penanganannya tidak boleh dipandang sebelah mata. Jumlah PMKS pada tahun 2019 sebesar 431.787 jiwa, jumlah PMKS ini meningkat sebesar 30.645 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah PMKS tahun 2018 sebesar 401.142 jiwa. Kenaikan jumlah PMKS ini dikarenakan :

- Jumlah masyarakat miskin meningkat karena adanya penambahan item rekapitulasi PMKS.
- Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) rehabilitasi sosial.
- Kurangnya memanfaatkan teknologi informasi dimana terdapat Satuan Kerja yang belum tepat waktu dalam menginput dan meregistrasi data by name by addres PMKS.
- Meningkatnya jumlah penerima PKH karena program nasional.
- Meningkatnya jumlah penerima Rastra dan BPNT karena program nasional.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang adalah dengan :

- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sangatlah diperlukan.
- Ketrampilan dan kesiagaan petugas yang menangani PMKS selalu siap setiap saat.
- Terbentuknya TRC dan LK3 dan lembaga-lembaga sosial yang ada.

3. **Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa,** dicapai dengan indikator Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks desa membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Ponorogo nomor 115 tahun 2019 tanggal 4 Nopember 2019, tipologi desa berdasarkan data indeks desa membangun adalah 8 (delapan) desa tertinggal, 250 (dua ratur lima puluh) desa berkembang dan 23 (dua puluh tiga) desa maju. Target tahun 2019 sebesar 0,7759 terealisasi 0,972* dengan capaian 125,27% masuk kategori **SANGAT BAIK.** Realisasi tahun 2019 ini masih sementara, menunggu release resmi dari Kemendes PDT. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dikarenakan :

- Dialokasikannya anggaran dana desa (baik DD maupun ADD) yang tinggi maka dapat mendukung desa untuk mebih maju dan kreatif.
- Alokasi anggaran untuk desa (baik DD/ADD) memberi peluang kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kreatif dan inovatif.
- Regulasi terhadap tatakelola Pemerintahan Desa
- Pengembangan Kelembagaan Desa dalam pemberdayaan perekonomian desa.
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Permasalahan :

- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
- Kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi desa.
- Belum adanya Sistem Data Desa yang terintegrasi.

Rencana tindak lanjut :

- Penambahan staf/pegawai.
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan.
- Memaksimalkan fungsi pendamping.

- Diadakan lomba/pameran inovasi.
- Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

4. **Sasaran Menurunnya pelanggaran Perda**, dengan indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

   Merupakan upaya aparat/masyarakat dalam pencegahan dan tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah. Target tahun 2019 sebesar 55% dan terealisasi sebesar 55,1% dengan capaian 100,18% masuk dalam kategori **SANGAT BAIK.** Pada tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat sejumlah 29 kasus dan terselesaikan sejumlah 16 kasus. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

   - Kreatifitas penyidikan dan penindakan guna tercapainya penegakan Perda.
   - Sosialisasi Peraturan Daerah.
   - Kerjasama dengan OPD yang lain dalam penegakan Perda.
   - Adanya patroli rutin.

   Permasalahan :

   - Keterbatasan anggaran, kurangnya personil dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi.
   - Keterbatasan kendaraan operasional

   Rencana tindak lanjut :

   - Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
   - Penindakan non yustisi.
   - Teguran dan peringatan secara lesan dan tertulis.
   - Peningkatan sosialisasi Perturan Daerah.

7. **Misi Ketujuh**, Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian, dengan **Tujuan ketujuh Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.**

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	Rata-rata lama Sekolah	8,25	7,17	7,17*	86,91%	8,85	81,02%
2.	Angka harapan lama sekolah	13,90	13,71	13,71*	98,63%	13,98	98,07%
3.	Usia harapan hidup	72,89	72,43	72,47*	99,42%	73,14	99,08%

Tujuan **Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas,** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. Sasaran Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga, dengan indikator :

a. Rata-rata lama sekolah.

Salah satu komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2015 menunjukkan angka 6,96 tahun, tahun 2016 menunjukkan angka 6,97 tahun, tahun 2017 menunjukkan angka 7,01 dan tahun 2018 menunjukkan angka 7,17.

Target tahun 2019 sebesar 8,25 tahun dan terealisasi 7,17* tahun dengan capaian sebesar 86,91% masuk dalam kategori **BAIK,** angka ini masih sementara karena menunggu hasil rilies resmi dari BPS Kabupaten Ponorogo**.** Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Ponorogo usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama sekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena penduduk dalam menjalani pendidikan formal tidak tuntas (drop out) dan tingkat penuntasan pendidikan formal penduduk tiap tahun merosot/tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Permasalahan :

- Karena Dinas Pendidikan hanya mengelola pendidikan formal tingkat SD dan SMP maka tingkat pendidikan lanjutan SMA, SMK, serta perguruan tinggi tidak bisa memantau atau menaikkan tingkat pendidikan penduduk pada jenjang tersebut.

Rencana tindak lanjut :

- Mencukupi daya tampung jenjang pendidikan SD dan SMP.
- Menurunkan angka droup out.
- Menaikkan Persentase kelulusan dan angka melanjutkan.
- Memberikan wawasan kepada orang tua murid pentingnya pendidikan anak.

b. Angka harapan lama sekolah.

Angka harapan lama sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas karena disesuikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun, semakin rendah angka harapan lama sekolah di suatu daerah menunjukkan sistem pendidikan yang tidak mendukung terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat artinya semakin rendah pula harapan penduduk untuk melanjutkan proses pendidikan hingga tingkat akhir.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun tahun 2015 menunjukkan angka 13,29 tahun, tahun 2016 menunjukkan angka 13,69 dan tahun 2017 menunjukkan angka 13,70 dan tahun 2018 menunjukkan angka 13,71 tahun.

Angka harapan lama sekolah target pada tahun 2019 sebesar 13,90 tahun terealisasi sebesar 13,71* tahun dengan capaian sebesar 98,63% masuk kategori **BAIK,** angka ini masih sementara karena menunggu hasil rilies resmi dari BPS Kabupaten Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) dimasa mendatang adalah selama 13,71 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Ketidakberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- *Drop out* dalam menempuh Pendidikan.
- Terbatasnya kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya sehingga tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang Pendidikan tinggi.
- Kurangnya wawasan dan pengetahuan orang tua terhadap pentingnya Pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga Pendidikan bukan prioritas utama bagi anak.
- Anak cacat dan berketerbelakangan mental usia sekolah tidak bersekolah.

Permasalahan :

- Masih ada siswa yang drop out dalam menempuh pendidikan.
- Kesadaran orang tua terhadap pendidikan bagi anak rendah.

Rencana tindak lanjut :

- Menurunkan angka droup out.
- Menumbuhkan wawasan dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak.
- Membantu biaya pendidikan anak kurang mampu melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP.

2. **Sasaran Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat**, dengan indikator Usia harapan hidup (UHH).

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajad kesehatan masyarakat. Tingginya pencapaian UHH juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan bahwa derajad kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Trend Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2015 menunjukkan angka 72,08 tahun, tahun 2016 menunjukkan angka 72,18 tahun, tahun 2017 menunjukkan angka 72,27 tahun dan tahun 2018 menunjukkan angka 72,43. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh faktor antara lain faktor kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, status kesehatan dan tingkat ekonomi. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Ponorogo tahun 2019 sebesar 72,47* dengan capaian sebesar 99,42% masuk kategori **BAIK.**

Permasalahan :

- Masih adanya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular.
- Masih ditemukannya kasus gizi buruk setiap tahun.
- Meningkatnya kejadian luar biasa (KLB) baik penyakit maupun bencana alam.
- Meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes mellitus.

Rencana tindak lanjut :

- Meningkatkan promosi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sekat (GERMAS) melalui PHBS dan pola hidup seimbang.
- Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- Mendekatkan pelayanan masyarakat melalui POSKESDES, POSYANDU BALITA, POSBINDU, POSYANDU LANSIA dan sebagainya.
- Meningkatkan ketersediaan logistik kesehatan seperti obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan.
- Meningkatkan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan melalui program SPGDT dan pembangunan kantor Publik Safety Center (PSC).

8. **Misi Ketujuh**, Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian, dengan **Tujuan kedelapan Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB.**

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Th. 2018	Th. 2019			
1.	IDG	63,51	67,28	64,14	100,99%	63,65	100,77%
2.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100%	91,67%	91,43%	91,43%	100%	91,43%
3.	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,18%	0,12%	0,12%*	133,33%	0,16%	125%
4.	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi	18,20%	12%	20%	109,89%	27,30%	73,26%
5.	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,20%	12,50%	15%	82,42%	25%	60%

Tujuan **Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB,** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk**, dengan indikator :
   a. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG**)

      Isu-isu gender dan anak menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan, mengingat masih sedikitnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta serta masih minimnya lembaga yang peduli terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), sehingga minimnya kualitas hidup perempuan yang ada saat ini juga banyaknya kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak (baik yang dilakukan oleh orang tua, teman sebaya maupun orang dewasa).

      Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2015 menunjukkan angka 62,82, tahun 2016 menunjukkan angka 62,95, tahun 2017 menunjukkan angka 63,08 dan tahun 2018 menunjukkan angka 67,28. Target tahun 2019 dengan angka 63,51 terealisasi dengan angka 64,137 dengan capaian sebesar 100,99% masuk kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

      - Peraturan yang menaungi (Undang-undang, PP, Perda, Perbub).
      - Institusi baik pemerintah maupun swasta yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.
      - Kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik dan kesehatan).
      - Data terpilah dapat menggambarkan yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan.
      - Perencanaan yang responsif gender.

      Permasalahan :

      - Kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.
      - Isu gender dan anak yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal.

      Rencana tindak lanjut :

      - Perencanaan yang responsif gender di masing-masing SKPD.

- Kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan.
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan melalui pembinaan yang bisa meningkatkan status sosial ekonominya.
- Melakukan koordinasi dengan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun swasta yang peduli perempuan dan anak.
- Melibatkan perempuan dalam setiap sektor pembangunan.
- Pemantapan gugus tugas yang ada (Fokal Point dan PT-PPO).

b. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.

Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti serangan seksual, kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik secara motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali, pornografi, tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci serta beberapa tindak kekerasan lainnya. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 sejumlah 35 kasus dan tertangani sejumlah 32 kasus, dengan capaian kinerja 91,43% masuk dalam kategori **BAIK.** Ketidakberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo dikarenakan kurangnya sosialisasi KDRT secara menyeluruh dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak baru terbentuk.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa langkah yang diambil adalah :

- Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan (legal training).
- Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
- Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Pembaharuan hukum terintegrasi perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentang atas pelanggaran HAM.
- Pembaruan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Bagi anak–anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi, maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.

Membentuk lembaga penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.

c. Persentase Laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi (perpindahan penduduk). Apabila angka kelahiran semakin kecil, maka LPP juga akan semakin menurun. Dalam rangka menurunkan jumlah kelahiran, perlu ada upaya melalui program KB yaitu pelayanan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

LPP Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 0,18%, tahun 2016 sebesar 0,16%, tahun 2017 sebesar 0,12% dan tahun 2018 sebesar 0,12%. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,18% terealisasi sebesar 0,12%* dengan capaian sebesar 133,33% masuk kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :

- Tersedianya SDM Penyuluh KB. Jumlah tenaga Penyuluh KB di Kabupaten Ponorogo sejumlah 109 orang, dengan 307 desa/kelurahan, yang artinya memiliki rasio 1 : 2,8 atau setiap 1 orang penyuluh KB menaungi 2 atau 3 desa/kelurahan. Memang ini dirasa belum optimal karena seharusnya 1 orang Penyuluh KB menaungi 1 desa/kelurahan, namun diantara Kebupaten/Kota di Jawa Timur khususnya, Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah Penyuluh KB paling mendekati ideal.
- Tersedianya sarana prasarana yang memadai, yaitu adanya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan, mobil unit penerangan, mobil unit pelayanan, mobil angkut calon akseptor KB, mobil box distribusi alkon dan sebagainya.
- Dukungan penggerakan dari SKPD terkait, mitra kerja, LSOM, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Sarana dan prasarana di faskes cukup memadai, sehingga bisa melaksanakan pelayanan KB yang berkualitas.

- Jumlah provider yang melakukan pelayanan KB cukup, hal ini didukung oleh jumlah faskes yang merata hampir di semua kecamatan, baik itu faskes tingkat pertama, faskes tingkat lanjutan, faskes tingkat pratama dan jejaringnya.
- Kompetensi provider memadai, karena semua faskes sudah ada tenaga medis yang berkompeten dalam pelayanan KB.
- Adanya peraturan bupati yang mengatur pelayanan KB gratis di semua faskes milik pemerintah, dalam kegiatan yang sifatnya momentum, seperti pada hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, hari TNI Manunggal, hari Bhayangkari, hari ulang tahun IBI dan lain sebagainya.

Permasalahan :

- Kurangnya angka partisipasi kepesertaan ber-KB bagi pria, dengan peserta KB aktif tahun 2018 sebanyak 114.704 orang dimana kesertaan pria ber KB vasektomi sebesar 579 orang atau 0,50%.
- Masih tingginya perkawinan pertama wanita dibawah usia 20 tahun yaitu 8,88%.
- Kualitas kelompok kegiatan yang ada di masyarakat (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaj/Mahasiswa) belum bisa optimal.
- Kualitas institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) juga belum optimal.

Rencana tindak lanjut :

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB.
- Meningkatkan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Meningkatkan pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya dari PIK-R yang ada.
- Mengoptimalkan advokasi, KIE dan promosi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.
- Peningkatan akses informasi dan kualitas kesehatan reproduksi bagi keluarga.

2. **Sasaran meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga**, dengan indikator :

a. Persentase Cabang olahraga yang berprestasi

Indikator kinerja Persentase cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Ponorogo ditargetkan 18,2% dan terealisasi sebesar 20% dengan capaian sebesar 109,89% masuk kategori **SANGAT BAIK**.

Perolehan prestasi olahraga diperoleh pada kejuaraan PORPROV JATIM dan kejuaran antar Cabang Olahraga di tingkat regional. Cabang Olahraga yang berprestasi tersebut yaitu Cabang Olahraga Pencak Silat, Cabang Olahraga Panahan, Cabang Olahraga PENTAQUE dan Cabang Olahraga Sepatu Roda.

- Fasilitasi pembinaan Cabor unggulan.
- Upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.
- Terpeliharanya sarana dan prasaranan olahraga

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan datang adalah :

- Mengajukan anggaran untuk pembinaan prestasi olahraga CABOR.
- Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga.
- Mengajukan sarana prasarana olahraga Cabor baik yang berprestasi maupun yang belum pernah berprestasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas /Lembaga yang berkompeten di bidang olahraga.

b. Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi

Indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi di kabupaten ponorogo yang ditargetkan sebesar 18,2% terealisasi sebesar 15% dengan capaian kinerja sebesar 82,42% masuk kategori **BAIK.** Pencapaian kinerja tersebut diperoleh dengan adanya 3 (tiga) organisasi kepemudaan yang beprestasi di tingkat regional maupun nasional yaitu Pemimpin Pemuda Muhamadiyah, PC GP Ansor dan Purna Prakarya Muda Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan datang adalah :

- Meningkatkan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan
- Meningkatkan pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda yang produktif. Koordinasi dan pembinaan secara berkala dan maksimal/regenerasi.
- Melakukan monitoring dan koordinasi, penatausahaan, pembinaan dan pelatihan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Lokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Alokasi Anggaran Belanja Persasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase
1	Terwujudnya pelayanan prima	26.932.972.730,00	3,01%
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	67.947.046.149,11	7,58%
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	8.491.510.000,00	0,95%
4	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	1.452.621.600,00	0,16%
5	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	7.371.641.500,00	0,82%
6	Optimalisasi sektor pariwisata	10.679.750.000,00	1,19%
7	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	80.000.000,00	0,01%
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	309.357.991.732,00	34,53%
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	49.297.359.112,00	5,50%
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	905.380.000,00	0,10%
11	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	17.325.354.372,00	1,93%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14.316.223.315,00	1,60%
13	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	752.000.000,00	0,08%
14	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	1.172.756.000,00	0,13%
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	4.697.964.450,00	0,52%
16	Menurunnya pelanggaran Perda	921.264.700,00	0,10%
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	103.760.036.259,51	11,58%
18	Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	262.031.820.077,04	29,25%
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk	7.467.207.000,00	0,83%
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	1.023.009.500,00	0,11%
Jumlah		**895.983.908.496,66**	**100%**
Belanja Langsung Pendukung		**115.282.071.419,00**	
Total Belanja Langsung		**1.011.603.329.915,66**	

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran

Tabel 3.18

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 1 Terwujudnya pelayanan prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,39	101,74%	26.932.972.730,00	26.516.959.799,00	98,46%
SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	2	Nilai SAKIP	BB	BB	101,39%	67.947.046.149,11	64.222.946.816,00	94,52%
	3	Nilai LPPD	ST	ST	100%			
	4	Opini BPK	WTP	WTP	100%			
SASARAN 3 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	5	Indeks profesionalitas ASN	86,6	80,8	93,3%	8.491.510.000,00	8.495.864.831,00	100,05%
SASARAN 4 Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	7	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	1,85%	1,7%	91,89%	1.452.621.600,00	1.390.758.652,00	95,74%
	8	Persentase Koperasi sehat	20%	29%	145%			
SASARAN 5 Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	9	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27%	0,27%	100%	7.371.641.500,00	6.801.088.417,00	92,26%
	10	Persentase PDRB sektor perdagangan	16,95%	16,92%*	99,82%			
	11	Persentase PDRB sektor industri	7,05%	7,15%*	101,42%			
SASARAN 6 Optimalisasi sektor pariwisata	12	Jumlah kunjungan wisata	482.464	1.123.063	232,78%	10.679.750.000,00	10.595.979.905,00	99,22%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 7 Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	13	Persentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN	2%	99,04%	4.952%	80.000.000,00	78.877.021,00	98,60%
SASARAN 8 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	14	Persentase Infrastruktur publik dalam kondisi baik	70%	68,48%	97,83%	309.357.991.732,00	304.153.009.442,00	98,32%
SASARAN 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	15	Nilai tukar petani	106,84	115,39*	108%	49.297.359.112,00	48.094.347.566,21	97,56%
	16	Persentase Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,50%	1,58%**	63,20%			
SASARAN 10 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	17	Angka kecukupan pangan utama	163.070,50	151.976,50	93,20%	905.380.000,00	903.091.700,00	99,75%
SASARAN 11 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	18	Persentase Permukiman sehat	76,78%	76,75%	99,96%	17.325.354.372,00	16.915.141.766,00	97,63%
SASARAN 12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,91	70,54	102,37%	14.316.223.315,00	13.928.232.808,00	97,29%
SASARAN 13 Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	20	Angka pengangguran terbuka	7,40%	3,33%	155%	752.000.000,00	740.340.625,00	98,45%
SASARAN 14 Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	21	Persentase Penurunan PMKS	2%	7,64%	(182%)	1.172.756.000,00	1.147.483.350,00	97,85%
SASARAN 15 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	6	Indeks Desa Membangun	0,7759	0,972*	125,27%	4.697.964.450,00	4.176.751.325,00	88,91%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 16 Menurunnya pelanggaran Perda	22	Persentase Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	55%	55,10%	100,18%	921.264.700,00	849.501.780,00	92,21%
SASARAN 17 Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	23	Rata-rata lama Sekolah	8,25	7,17*	86,91%	103.760.036.259,51	99.822.963.936,11	96,21%
	24	Angka harapan lama sekolah	13,90	13,71*	98,63%			
SASARAN 18 Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	25	Usia harapan hidup	72,89	72,47*	99,42%	262.031.820.077,04	253.057.319.551,50	96,58%
SASARAN 19 Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk	26	IDG	63,51	64,14	100,99%	7.467.207.000,00	6.924.221.047,00	92,73%
	27	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100%	91,43%	91,43%			
	28	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	0,18%	0,12%*	133,33%			
SASARAN 20 Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	29	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi	18,20%	20%	109,89%	1.023.009.500,00	1.007.068.769,00	98,44%
	30	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,20%	15%	82,42%			

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya , yang merupakan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.19

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya pelayanan prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,74%	98,46%	3,28%
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	2	Nilai SAKIP	101,39%	94,52%	5,48%
		3	Nilai LPPD	100%		
		4	Opini BPK	100%		
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	5	Indeks profesionalitas ASN	93,3%	96,23%	(2,93%)
4	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	7	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	91,89%	95,74%	22,71%
		8	Persentase Koperasi sehat	145%		
5	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	9	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	100%	92,26%	8,15%
		10	Persentase PDRB sektor perdagangan	99,82%		
		11	Persentase PDRB sektor industri	101,42%		
6	Optimalisasi sektor pariwisata	12	Jumlah kunjungan wisata	232,78%	99,22%	133,56%
7	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	13	Persentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN	4.952%	98,60%	180,90%
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	14	Persentase Infrastruktur publik dalam kondisi baik	97,83%	98,32%	(0,49%)
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	15	Nilai tukar petani	108%	97,56%	(11,96%)
		16	Persentase Pertumbuhan nilai PDRB	63,20%		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
			kategori pertanian dan perikanan			
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	17	Angka kecukupan pangan utama	93,20%	99,75%	(6,55%)
11	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	18	Persentase Permukiman sehat	99,96%	97,63%	2,33%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	102,37%	97,29%	5,08%
13	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	20	Angka pengangguran terbuka	155%	98,45%	56,55%
14	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	21	Persentase Penurunan PMKS	(182%)	97,85%	(279,85%)
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	6	Indeks Desa Membangun	125,27%	88,91%	36,36%
16	Menurunnya pelanggaran Perda	22	Persentase Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,18%	92,21%	7,97%
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	23	Rata-rata lama Sekolah	86,91%	96,21%	(3,44%)
		24	Angka harapan lama sekolah	98,63%		
18	Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	25	Usia harapan hidup	99,42%	96,58%	2,84%
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk	26	IDG	100,99%	92,73%	15,85%
		27	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	91,43%		
		28	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	133,33%		
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	29	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi	109,89%	98,44%	93,87%
		30	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi	82,42%		

2. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya Dengan Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan ketentuan, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas tersebut menggambarkan bagaimana uang daerah telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Rasio keuangan tersebut dianalisis untuk dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode berikutnya sehingga dapat dilihat trend/kecenderungannya. Analisis tersebut berguna sebagai data untuk pengambilan keputusan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan rasio keuangan yang digunakan dalam laporan ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pengelolaan Belanja dan Rasio Pertumbuhan..

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Formulasinya sebagai berikut :

$$Rasio\ Kemandirian\ Daerah = \frac{PAD}{(Dana\ Perimbangan + Pinjaman\ Daerah)} x100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian daerah, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20

Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

Sumber: Keputusan Mendagri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996

Adapun perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian (%)
2013	134.097.320.780,57	1.016.758.344.123,00	-	13,19
2014	198.730.421.479,94	1.099.675.841.581,00	-	18,07
2015	210.695.348.134,82	1.144.291.367.053,00	-	18,41
2016	240.111.321.573,88	1.455.939.797.771,00	-	16,49
2017	308.232.104.639,07	1.433.075.787.760,00	-	21,50
2018	289.017.741.958,47	1,552,016,044,423.00	-	18,62
2019	290.815.307.168,20	1.514.964.426.526,00	-	19,20

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013–2018 dan LRA TA. 2019 un-Audited

Gambar 3.1

Rasio Kemandirian

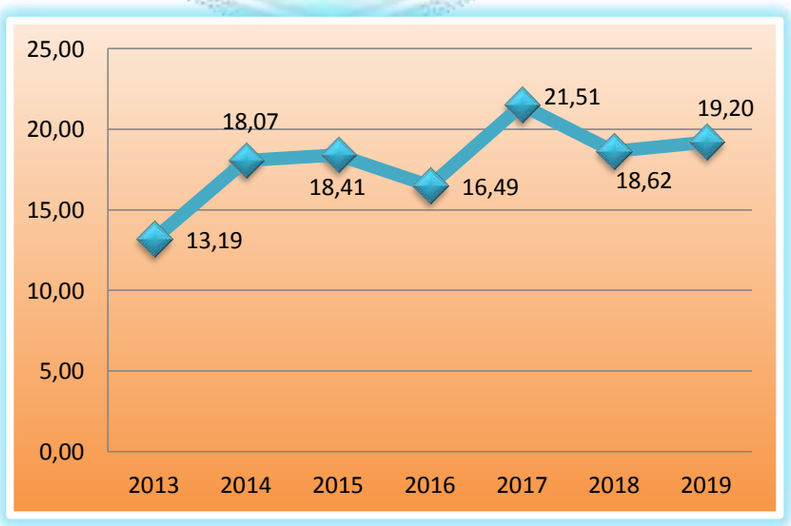

Grafik di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di bawah 25% (pola hubungan Instruktif). Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Pola ini dari sisi finansial menujukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Walaupun demikian trend perkembangan kemandirian daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus dalam menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektifitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD\ sesuai\ Potensi\ Riil} x100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio efektivitas PAD, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	**Kemandirian**
Sangat Efektif	> 100
Efektif	>90 - 100
Cukup Efektif	>80 - 90
Kurang Efektif	>60 - 80
Tidak Efektif	≤ 60

Sumber: Keputusan Mendagri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996

Adapun perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemkab Ponorogo

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)
2013	134.097.320.780,57	116.076.194.729,16	115,53
2014	198.730.421.479,94	166.946.342.772,16	119,04
2015	210.695.348.134,82	199.120.659.301,16	105,81

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)
2016	240.111.321.573,88	223.153.364.741,00	107,60
2017	308.232.104.639,07	307.538.129.095,30	100,22
2018	289.017.741.958,47	258.942.963.965,67	111,61
2019	290.815.307.168,20	287.705.087.351,98	101,08

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013–2018 dan LRA TA. 2019 un-Audited

Gambar 3.2

Rasio Efektivitas

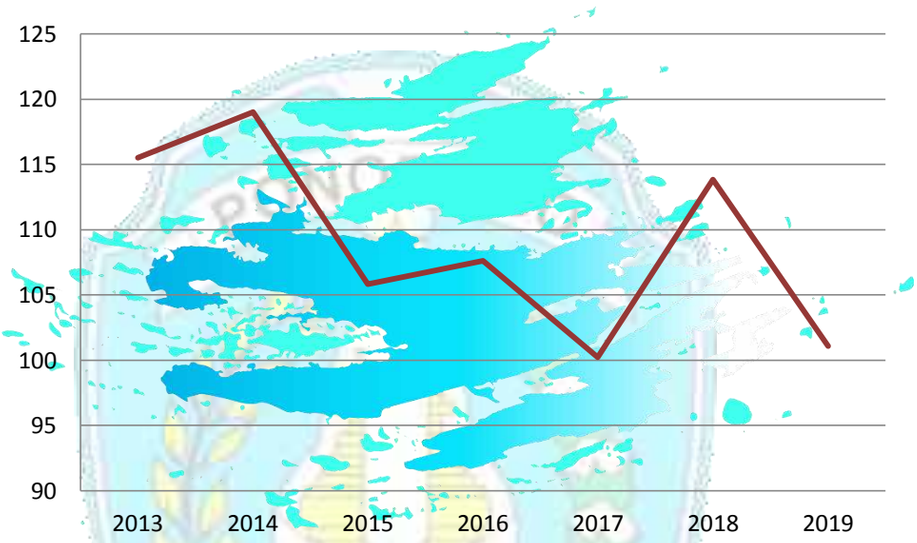

Grafik di atas menunjukkan bahwa Tingkat Keefektivitas an PAD Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di atas 100%, artinya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat efektif dalam pencapaian target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

3. Rasio Keserasian/Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin dapat diartikan bahwa persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio yang dipergunakan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Rasio Aktivitas Belanja Modal.

a. Rasio Aktivitas Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai porsi

belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Formulasinya sebagai berikut :

$$Rasio\ Aktivitas\ Belanja\ Operasi = \frac{Belanja\ Operasi}{Total\ APBD} x100\%$$

b. Rasio Aktivitas Belanja Modal merupakan perbandingan antara total Belanja Pembangunan/Fisik dengan Total Belanja Daerah. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar pula investasi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Formulasinya sebagai berikut :

$$Rasio\ Aktivitas\ Belanja\ Modal = \frac{Belanja\ Pembangunan/Modal}{Total\ APBD} x100\%$$

Berdasarkan rumus di atas maka rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24

Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Moda Pemkab Ponorogo

Tahun	Belanja (Rp)		Total Pendapatan/APBD	Rasio Aktivitas (%)	
	Operasi	Modal		Operasi	Modal
2013	1.281.781.796.279,00	110.848.141.315,00	1.452.191.618.348,57	88,27	7,63
2014	1.353.550.637.182,00	176.983.715.062,00	1.704.809.253.588,94	79,40	10,38
2015	1.359.824.885.940,86	376.402.638.867,00	1.866.869.447.087,82	72,84	20,16
2016	1.379.876.721.213,00	324.169.328.852,00	2.026.630.853.798,86	68,09	16,00
2017	1.365.172.204.404,26	465.255.813.618,53	2.215.197.920.702,07	61,62	21,00
2018	1.395.244.691.356,50	403.302.695.098,47	2.300.334.167.916,11	60,65	17,53
2019	1.541.698.062.719,61	427.431.320.957,21	2.338.257.304.540,20	65,93	18,28

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013–2018 dan LRA TA. 2019 un-Audited

Gambar 3.3

Rasio Aktivitas

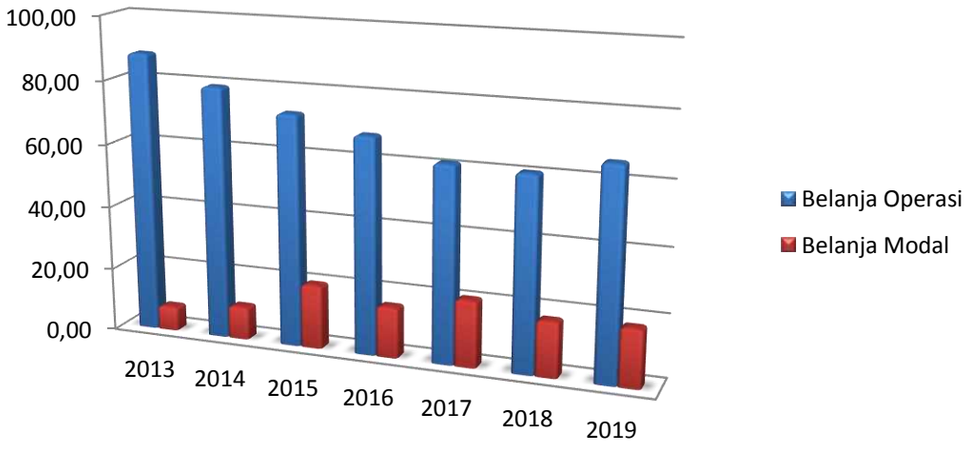

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dana Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih digunakan untuk belanja operasi. Paling besar pada tahun 2013 sebesar 88,27 dan paling rendah tahun 2018 sebesar 60,90% namun meningkat pada tahun 2019 (rata-rata 70,97%), sedangkan porsi belanja modal rata-rata masih 15,86%. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menelaah kembali porsi pengganggaran untuk mendukung prioritas pembangunan berupa penyediaan dana untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat serta pelayanan publik karena efek multiplier yang dihasilkan lebih besar daripada belanja operasi.

4. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau deficit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau deficit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat di pengaruhi beberapa factor antara lain:

a. Keterlambatan penetapan besarana lokasi Anggaran Dana Perimbangan;
b. Adanya program kegiatan yang dibiayaidari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah;
c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

Formulasinya sebagai berikut :

$$Rasio\ Pengelolaan\ Belanja = \frac{Total\ Pendapatan\ Daerah}{Total\ Belanja\ Daerah} x100\%$$

Tabel 3.25

Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan RPB Pemkab Ponorogo

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio Pengelolaan Belanja (%)
2013	1.396.914.654.794,00	1.452.191.618.348,57	103,96
2014	1.626.511.374.280,00	1.704.809.253.588,94	104,81
2015	1.688.021.600.792,86	1.866.869.447.087,82	110,60
2016	1.765.262.480.445,90	2.026.630.853.798,86	114,81
2017	1.832.144.056.222,79	2.215.197.920.702,07	120.91
2018	2.210.190.859.171,97	2.300.334.167.916,11	104,08
2019	2.425.399.402.948,82	2.338.257.304.540,20	96,41

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013–2018 dan LRA TA. 2019 un-Audited

Gambar 3.4

Rasio Pengelolaan Belanja

Pada grafik diatas, Rasio pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan hingga tahun 2017, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kenaikan belanja tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing kompunen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio Pertumbuhan dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi\ Penerimaan\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ Xn - Xn - 1}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ Xn - 1} x100\%$$

$$Rasio\ Pertumbuhan \sum Pendapatan = \frac{Realisasi\ Penerimaan \sum Pendapatan\ Xn - Xn - 1}{Realisasi\ Penerimaan \sum Pendapatan\ Xn - 1} x100\%$$

$$Rasio\ Pertumbuhan\ Belanja\ Operasi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran \sum Belanja\ Operasi\ Xn - Xn - 1}{Pengeluaran \sum Belanja\ Operasi\ Xn - 1} x100\%$$

$$Rasio\ Pertumbuhan\ Belanja\ Modal = \frac{Realisasi\ Pengeluaran \sum Belanja\ Modal\ Xn - Xn - 1}{Pengeluaran \sum Belanja\ Modal\ Xn - 1} x100\%$$

Tabel 3.26

Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemkab Ponorogo

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
PAD	134.097.320.780,57	198.730.421.479,94	210.695.348.134,82	240.111.321.573,88	308.232.104.639,07	289.017.741.958,47	290.815.307.168,20	
Rasio Pertumbuhan PAD	23,29%	48,20%	6,02%	13,96%	28,37%	(6,23)%	0,62	19,04%
Total Pendapatan	1.452.191.618.348,57	1.704.809.253.588,94	1.866.869.447.087,82	2.026.630.853.798,86	2.215.197.920.702,07	2.300.334.167.916,11	2.338.257.304.540,20	
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	14,3%	17,40%	9,51%	8,56%	9,3%	3,84%	1,65%	10,49%
Belanja Operasi	1.281.781.796.279,00	1.353.550.637.182,00	1.359.824.885.940,86	1.379.876.721.213,00	1.365.172.204.404,26	1.395.244.691.356,50	1.541.698.062.719,61	
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	20,06%	5,6%	0,46%	1,47%	(1,07)%	2,20%	10,50%	4,79%
Belanja Modal	110.848.141.315,00	176.983.715.062,00	376.402.638.867,00	324.169.328.852,00	465.255.813.618,53	403.302.695.098,47	427.431.320.957,21	
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	(42,68%)	59,66%	112,68%	(13,88)%	43,52%	(13,32)%	5,98	24,33%

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 – 2018 dan LRA TA. 2019 un-Audited

Rasio pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD selama 6 tahun sebesar 19,04% menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meskipun pada tahun 2015 dan 2018 mengalami penurunan.

Pertumbuhan pendapatan pemerintah kabupaten Ponorogo rata-rata sebesar 10,49%. Rasio belanja operasi rata-rata selama 6 tahun sebesar 4,79%. Rasio belanja modal rata- rata sebesar 24,33%. Berdasarkan tabel di atas rasio pertumbuhan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan baik.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) misi, 20 (dua puluh) sasaran dan 30 (tiga puluh) indikator sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja atau 46,67% kriteria **SANGAT BAIK**, 14 (empat belas) indikator kinerja atau 46,67% kriteria **BAIK**, 2 (dua) indikator kinerja atau 6,66% tidak mencapai target. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum sesuai harapan, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta sebagai peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Dibutuhkan dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan pentingnya SAKIP, dengan adanya kebijakan dari masing-masing pimpinan unit kerja yang mewadahi penerapan SAKIP.
2. Perlu adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar tercipta kejelasan arah penerapan SAKIP yang baik dan benar sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan yang telah disusun.

3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil, sehingga terjadi sinkronisasi antara harapan masyarakat dengan upaya dari aparat pemerintah.

Ponorogo, 17 Maret 2020

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN

Lampiran I
INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PONOROGO

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Pertumbuhan Ekonomi	$r = \{(Pt/(Pt-1)) - 1\}x100$ Keterangan : r : Pertumbuhan Ekonomi Pt : PDRB Tahun ke-t (Harga Konstan) Pt-1 : PDRB Tahun sebelumnya (Harga Konstan)	BPS
Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} x100$	BPD
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang belum bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$ x 100	DISNAKER
Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).	BAPPEDA LITBANG
Indeks Pembangunan Manusia	Total jumlah indeks harapan hidup + rata-rata lama sekolah + standar hidup layak dibagi 3 kemudian dikalikan 100%.	BPS

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i \, [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan : GR : Indeks Gini Fi : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i Yi : jumlah komulatif (%) pendapatan pada kelas ke i	BAPPEDA LITBANG
Infrastruktur Publik Dalam Keadaan baik.	(Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik + persentase jembatanm kabupaten dalam kondisi baik + persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik) / 3	DINAS PU PKP
Opini BPK	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (LKPD).	BPPKAD

Lampiran II
MATRIKS PERUBAHAN RPJMD

MATRIKS PURUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
MISI 1 : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah															
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	73	Terwujudnya pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang urusan pemerintahan	Setda Dukcapil Perpusip DPMPTSP Kecamatan	Indeks	77,51	78	79	79	80	80	81
				Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Penunjangurusan pemerintahan	Setda Bappeda Litbang Inspektorat	Nilai	CC	B	B	B	BB	A	A
					Nilai LPPD	Penunjang urusan pemerintahan	Setda	Nilai	T	T	T	T	ST	ST	ST
					Opini BPK	Penunjang urusan pemerintahan	BPPKAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
				Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	Penunjang urusan pemerintahan	BKPPD	Indeks	n/a	n/a	86	86,3	86,6	86,9	87,2
MISI 2 : Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi,industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah															
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	6,65	Meningkatnya Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Perdakum	Persen	1,80%	1,82%	1,83%	1,84%	1,85%	1,87%	1,90%
					% Koperasi sehat	Koperasi dan UKM	Dinas Perdakum	Persen	11,67%	13,00%	15,00%	18,00%	20,00%	20,00%	22,00%
	Indeks GINI (Ketimpangan Wilayah)	0,29	0,25	Meningkatnya pertumbuhan industry dan perdagangan	% Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perdakum	Persen	0,20%	0,20%	0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,33%
					% PDRB Sektor Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdakum	Persen	16,15%	16,40%	16,75%	16,85%	16,95%	17,05%	17,15%
					% PDRB Sektor Industri	Perindustrian	Dinas Perdakum	Persen	6,74%	6,85%	6,95%	7,00%	7,05%	7,10%	7,15%
				Optimalisasi Sektor Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Orang	396.926	416.772	437.610	459.490	482.464	506.587	531.916
				Meningkatnya Iklim Investasi sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi	% Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	Penanaman Modal	DPM PTSP	Persen	-	-	2%	2%	2%	2%	2%

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
MISI 3 : Mewujudkan pengelolaaninfras truktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat															
Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab	Indeks Infrastruktur	67%	76%	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Perhubungan	Dinas PUPR Dishub	Persen	71,53%	75,69%	77,04%	78,6%	81,55%	83,6%	83%
MISI 4 : Membangun Pertanian Sebagai Pengembangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing Tangguh															
Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing	PDRB sektor pertanian	4,7	5,4	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Pertanian	Dinas Pertanian	Persen	104,75	107,59	105,6	106,21	106,84	107,25	107,85
					% Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	Persen	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Angka kecukupan pangan utama	Pangan	Dinas Ketahananpangan	Persen	142.870,3	147.920,3	152.970,4	158.020,4	163.070,5	168.120,5	173.170,6
MISI 5 : Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan															
Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat	Indeks kualitas lingkungan hidup	64,74	69,00	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	% Permukiman sehat	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PKP	Persen	74,21	74,60	74,95	75,67	76,78	77,09	78,57

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Lingkungan hidup	DLH BPBD	Indeks	67,28	67,28	67,82	68,36	68,91	69,45	70
MISI 6 : Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan															
Mengentaskan Penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja, serta penegakan hukum	Angka kemiskinan	11,91	10,95	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Angka pengangguran terbuka	Ketenaga kerjaan	Disnkaer	Persen	7,69%	7,69 %	7,6 %	7,5 %	7,4 %	7,3 %	7,3 %
				Menurunnya Masalah kesejahteraan sosial	% Penurunan PMKS	Sosial	Dinsos	Persen	2 %	2 %	2 %	2 %	2%	2 %	2 %
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas PMD	Indeks	n/a	0,4076	0,7154	0,7459	0,775	0,806	0,8461
	Pelaksanaan Norma Hukum Daerah (Perda)	70%	95%	Menurunnya pelanggaran Perda	% Penaganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Ketahanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Persen	n/a	13%	22%	35%	55%	75%	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
MISI 7 : Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompentensi yang cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian															
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	IPM	67,40	69,40	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	Rata-rata lama sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahun	6,90	7,15	7,50	7,85	8,25	8,60	8,85
					Angka harapan lama sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahun	13,29	13,69	13,72	13,81	13,90	13,95	13,98
				Meningkatnya derajat/status kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Dinkes RSUD	Tahun	72,08	72,14	72,39	72,64	72,89	73,14	73,14
Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB	Indeks Pembangunan Gender	62,82	63,42	Menigkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan Pengendalian Penduduk	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A	Indeks	62,82	62,96	63,10	63,24	63,51	63,55	63,65
					% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					% Laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas PPKB	Persen	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16

Tujuan	Indikator Tujuan	Taget		Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target						
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir
				Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	% Cabang olahraga yang berprestasi.	Kependudukan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Persen	n/a	4,5	9	13,6	18,2	22,7	27,3
					% Organisasi Kepemudaan yang berprestasi	Kependudukan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Persen	n/a	5	10	14,3	18,2	21,7	25

Lampiran III
PENGUKURAN KINERJA 2019

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Ponorogo

Tahun : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,39	101,74%
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	2	Nilai SAKIP	BB	BB	101,39%
		3	Nilai LPPD	ST	ST*	100%
		4	Opini BPK	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	5	Indeks profesionalitas ASN	86,6	80,8	93,30%
4	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	6	% Pertumbuhan usaha mikro	1,85	1,7%	91,89%
		7	% Koperasi sehat	20,00	29%	145%
5	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	8	% Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27	0,27%	100%
		9	% PDRB sektor perdagangan	16,95	16,92%*	99,82%
		10	% PDRB sektor industri	7,05	7,15%*	101,42%
6	Optimalisasi sektor pariwisata	11	Jumlah kunjungan wisata	482.464	1.123.063	232,78%
7	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	12	% Pertumbuhan nilai investasi PMDN	2	5,59%	279,50%
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	13	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik	70	68,48%	97,83%
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	14	Nilai tukar petani	106,84	115,39*	108%
		15	% Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,5	1,58%**	63,20%
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	16	Angka kecukupan pangan utama.	163.070,5	151.976,5	93,20%
11	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	17	% Permukiman sehat	76,78	76,75%	99,96%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,91	70,54	102,37%
13	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	19	Angka pengangguran terbuka	7,40 %	3,33%	155%

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
14	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	20	% Penurunan PMKS	2	7,64%	(182%)
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	21	Indeks Desa Membangun	0,7759	0,972*	125,27%
16	Menurunnya pelanggaran Perda.	22	% Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	55	55,10%	100,18%
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	23	Rata-rata lama Sekolah	8,25	7,17*	86,91%
		24	Angka harapan lama sekolah	13,90	13,71*	98,63%
18	Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	25	Usia harapan hidup	72,89	72,47*	99,42%
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	26	IDG	63,51	64,14	100,99%
		27	% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100	91,43%	91,43%
		28	% Laju pertumbuhan penduduk	0,18	0,12%*	133,33%
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	29	% Cabang olahraga yang berprestasi	18,2	20%	109,89%
		30	% Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,2	15%	82,42%

Ponorogo, 17 Maret 2020

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

Lampiran IV
REVIU PK BUPATI 2019

BUPATI PONOROGO

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. IPONG MUCHLISSONI
Jabatan : BUPATI PONOROGO

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ponorogo, 1 Oktober 2019

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KABUPATEN PONOROGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target
1	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	2	Nilai SAKIP	BB
		3	Nilai LPPD	ST
		4	Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	5	Indeks profesionalitas ASN	86,6
4	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	6	% Pertumbuhan usaha mikro	1,85
		7	% Koperasi sehat	20,00
5	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	8	% Pertumbuhan industri kecil dan menengah	0,27
		9	% PDRB sektor perdagangan	16,95
		10	% PDRB sektor industri	7,05
6	Optimalisasi sektor pariwisata	11	Jumlah kunjungan wisata	482.464
7	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah	12	% Pertumbuhan nilai investasi PMDN	2
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	13	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik	70
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	14	Nilai tukar petani	106,84
		15	% Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,5
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	16	Angka kecukupan pangan utama	163.070,5
11	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	17	% Permukiman sehat	76,78
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,91
13	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	19	Angka pengangguran terbuka	7,40 %
14	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	20	% Penurunan PMKS	2
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	21	Indeks Desa Membangun	0,7759
16	Menurunnya pelanggaran Perda.	22	% Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	55

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga	23	Rata-rata lama Sekolah	8,25
		24	Angka harapan lama sekolah	13,90
18	Meningkatnya derajad/status kesehatan masyarakat	25	Usia harapan hidup	72,89
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	26	IDG	63,51
		27	% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100
		28	% Laju pertumbuhan penduduk	0,18
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	29	% Cabang olahraga yang berprestasi	18,2
		30	% Organisasi kepemudaan yang berprestasi	18,2

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	69.046.487.237,00
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.	37.742.669.103,00
3.	Peningkatan disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	5.373.164.550,00
4.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	3.457.100.529,00
5.	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rp.	34.856.311.700,00
6.	Pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini	Rp.	3.102.753.600,00
7.	Peningkatan jutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp.	503.037.300,00
8.	Manajemen pelayanan pendidikan	Rp.	143.425.000,00
9.	BOS satuan pendidikan SMP negeri	Rp.	21.599.086.670,40
10.	BOS satuan pendidikan SD negeri	Rp.	43.555.421.989,11
11.	Upaya kesehatan masyarakat	Rp.	6.087.410.905,00
12.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp.	1.000.000.000,00
13.	Standarisasi pelayanan kesehatan	Rp.	630.400.000,00
14.	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp.	10.768.245.215,00
15.	Pembinaan lingkungan sosial	Rp.	9.731.240.000,00
16.	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan	Rp.	8.763.935.865,00
17.	Kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan penyakit	Rp.	421.994.000,00
18.	Pelayanan kesehatan pada UPT	Rp.	70.944.996.260,98
19.	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Rp.	4.702.513.000,00

	PROGRAM		ANGGARAN
20.	Pelayanan dasar	Rp.	3.006.765.000,00
21.	Penurunan stanting	Rp.	734.448.751,00
22.	Pengendalian penyakit	Rp.	3.680.641.760,00
23.	Pelayanankesehatan rujukan	Rp.	3.466.999.000,00
24.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD	Rp.	138.092.230.320,06
25.	Pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	162.280.406.300,00
26.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	36.983.303.500,00
27.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.	88.707.675.312,00
28.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp.	400.000.000,00
29.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp.	11.541.256.600,00
30.	Pengendalian banjir	Rp.	3.990.000.000,00
31.	Tata ruang wilayah	Rp.	578.731.220,00
32.	Jasa konstruksi	Rp.	408.702.800,00
33.	Perumahan dan kawasan permukiman	Rp.	7.182.122.772,00
34.	Peningkatan kualitas perumahan swadaya	Rp.	133.398.000,00
35.	Pembangunan prasarana sanitasi	Rp.	714.572.600,00
36.	Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP)	Rp.	2.892.326.000,00
37.	Pembangunan bangunan gedung	Rp.	6.402.935.000,00
38.	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	59.650.000,00
39.	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	366.654.800,00
40.	Pendidikan politik masyarakat	Rp.	240.000.000,00
41.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	172.560.000,00
42.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.	20.000.000,00
43.	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.	41.808.000,00
44.	Sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat	Rp.	20.591.900,00
45.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp.	178.325.000,00
46.	Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Rp.	1.038.880.000,00
47.	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Rp.	1.325.200.000,00

	PROGRAM		ANGGARAN
48.	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp.	297.180.000,00
49.	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Rp.	261.006.000,00
50.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp.	208.000.000,00
51.	Bantuan dan perlindungan sosial	Rp.	278.750.000,00
52.	Peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan wilayah transmigrasi	Rp.	32.000.000,00
53.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rp.	60.000.000,00
54.	Pengembangan hubungan industrial syarat kerja dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial	Rp.	60.000.000,00
55.	Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Rp.	397.590.000,00
56.	Peningkatan diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp.	507.790.000,00
57.	Pengelolaan sampah dan pertamanan	Rp.	8.186.275.427,00
58.	Pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	465.720.000,00
59.	Penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rp.	208.555.000,00
60.	Pemanfaatan data kependudukan	Rp.	529.996.650,00
61.	Pelayanan pencatatan sipil	Rp.	121.056.500,00
62.	Pelayanan pendaftaran penduduk	Rp.	1.468.526.600,00
63.	Pengelolan informasi administrasi kependudukan	Rp.	690.878.650,00
64.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	71.786.250,00
65.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp.	2.600.325.250,00
66.	Penyelenggaraan penataan desa	Rp.	84.432.090,00
67.	Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan ekonomi masyarakat pedesaan	Rp.	207.635.100,00
68.	Bina pemerintahan desa	Rp.	1.733.785.760,00
69.	Keluarga berencana	Rp.	1.325.090.000,00
70.	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Rp.	860.950.000,00
71.	Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan	Rp.	4.983.987.000,00
72.	Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp.	2.897.660.000,00
73.	Peningkatan pelayanan angkutan	Rp.	1.485.520.000,00
74.	Engendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	84.736.000,00

	PROGRAM		ANGGARAN
75.	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp.	84.000.000,00
76.	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp.	85.900.000,00
77.	Penyelenggaraan persandian	Rp.	63.050.000,00
78.	Kerjasama informasi dengan mas media	Rp.	185.700.000,00
79.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan	Rp.	75.000.000,00
80.	Peningkatan kualitas layanan informasi	Rp.	78.300.000,00
81.	Aplikasi informasi, E-government dan infrastruktur TIK	Rp.	1.872.221.000,00
82.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Rp.	223.300.000,00
83.	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Rp.	86.817.400,00
84.	Revitasisasi pusat perdagangan	Rp.	4.503.350.000,00
85.	Pengembangan dan pengelolaan pasar	Rp.	364.740.000,00
86.	Peningkatan dan pengembangan perdagangan	Rp.	124.357.920,00
87.	Kemetrologian	Rp.	1.301.642.180,00
88.	Pengembangan koperasi dan usaha mikro	Rp.	442.200.000,00
89.	Peningkatan iklim dan realisasi investasi	Rp.	80.000.000,00
90.	Pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu	Rp.	1.338.900.000,00
91.	Peningkatan akuntabilitas di bidang perijinan	Rp.	69.500.000,00
92.	Pelayanan kepemudaan	Rp.	476.209.500,00
93.	Peningkatan prestasi olahraga	Rp.	355.000.000,00
94.	Pembudayaan olahraga	Rp.	191.800.000,00
95.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rp.	178.223.600,00
96.	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp.	42.716.350,00
97.	Pengelolaan perpustakaan	Rp.	71.530.000,00
98.	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp.	82.821.650,00
99.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Rp.	11.950.000,00
100.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp.	161.551.000,00
101.	Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp.	3.333.700.000,00
102.	Pengembangan destinasi pariwisata	Rp.	1.157.250.000,00
103.	Pengembangan kemitraan	Rp.	555.800.000,00
104.	Pengembangan nilai budaya kekayaan, keragaman dan kerjasama budaya	Rp.	5.608.000.000,00
105.	Peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan penyuluh	Rp.	1.635.332.500,00

	PROGRAM		ANGGARAN
106.	Peningkatan produksi pertanian	Rp.	229.912.500,00
107.	Pengembangan perikanan dan promisi hasil perikanan	Rp.	1.090.395.000,00
108.	Peningkatan prouksi hasil peternakan	Rp.	3.707.726.000,00
109.	Peningkatan kualitas bahan baku	Rp.	1.625.875.112,00
110.	Peningkatan produksi perkebunan	Rp.	176.725.000,00
111.	Pengembangan lingkungan ramah lingkungan/pertanian organikah	Rp.	37.254.180.500,00
112.	Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Rp.	3.577.212.500,00
113.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp.	429.852.300,00
114.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp.	693.757.300,00
115.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp.	11.949.516.650,00
116.	Penataan peraturan perundang-undangan dan peningkatan sumber daya aparatur	Rp.	1.436.641.250,00
117.	Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	Rp.	1.023.307.500,00
118.	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Rp.	397.077.943,11
119.	Kelembagaan, ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja	Rp.	1.162.357.500,00
120.	Pengembangan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, peningkatan pelayanan kedinasan dan kesehatan	Rp.	3.277.915.665,00
121.	Perencanaan pembangunan ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif	Rp.	528.174.250,00
122.	Pembinaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	Rp.	822.710.500,00
123.	Kehumasan, protokoler dan pengaduan masyarakat	Rp.	4.008.887.020,00
124.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp.	15.809.825.000,00
125.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	1.145.000.000,00
126.	Penyelenggaraan pelayanan umum	Rp.	67.442.000,00
127.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Rp.	12.632.317.930,00
128.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	1.000.690.000,00
129.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp.	5.000.000,00
130.	Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Rp.	547.510.000,00
131.	Perencanaan pembangunan daerah	Rp.	6.388.165.467,00

	PROGRAM		ANGGARAN
132.	Perencanaan pembangunan ekonomi	Rp.	651.567.200,00
133.	Perencanaan sosial dan budaya	Rp.	1.442.200.000,00
134.	Penelitian, pengembangan data/informasi, rancana dan hasil-hasil pembangunan	Rp.	1.531.000.000,00
135.	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	Rp.	1.643.550.000,00
136.	Akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Rp.	920.690.000,00
137.	Penatausahaan keuangan daerah	Rp.	1.546.628.300,00
138.	Peningkatan dan pengembangan pajak daerah	Rp.	3.975.861.654,00
139.	Pengendalian pendapatan daerah	Rp.	1.223.860.650,00
140.	Penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik daerah	Rp.	1.777.765.000,00
141.	Peningkatan sumber daya aparatur	Rp.	4.516.330.000,00
142.	Formasi dan pengembangan pegawai	Rp.	593.000.000,00
143.	Mutasi, kepangkatan, perpindahan dan pensiun	Rp.	1.389.200.000,00
144.	Pembinaan, kesejahteraan dan informasi kepegawaian	Rp.	1.992.980.000,00
145.	Pengembangan lingkungan industri	Rp.	699.134.000,00
146.	Pembinaan industri	Rp.	68.300.000,00
147.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Rp.	5.474.399.450,00
148.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp.	4.154.526.350,00
	JUMLAH	Rp.	**1.011.603.329.915,66**

Ponorogo, 1 Oktober 2019

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

Lampiran V
PENGHARGAAN TAHUN 2019

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGHARGAAN 2019
Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 terhadap Standart Pelayanan Publik

SWASTI SABA
PENGHARGAAN 2019
Swasti Saba Wistara Tahun 2019 dari Kemendagri dan Kemenkes

PENGHARGAAN 2019
Rekor MURI Pagelaran Reyog Ponorogo dengan Penari Jathil terbanyak Tahun 2019

PENGHARGAAN 2019
Sebagai partisipan dalam acara "International Tourism Fair of Madagaskar 2019"
yang diberikan oleh KBRI Antarianarivo Madagaskar

PENGHARGAAN 2019
Kearsipan Nasional sebagai Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori "Baik"
berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018

PENGHARGAAN 2019
Wahana Tata Nugraha Tanpa Catatan Tahun 2019

BUPATI PONOROGO
PENGHARGAAN 2019
Pemenang Award Peduli Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
kategori Bidang Pengelolaan Pertanian Ramah Lingkungan

PENGHARGAAN 2019
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Piagam Penghargaan
Nomor : 913/7115/110.5/2019
Diberikan kepada :
PONOROGO
SEBAGAI JUARA II
Lomba Cipta Menu (LCM) Berbasis Pangan Lokal Tahun 2019 (Kategori Umum)
Ir. HADI SULISTYO, M.SI
PENGHARGAAN 2019
Juara II Kategori Umum Lomba Cipta Menu (LCM) Berbasis Pangan Lokal Tahun 2019